



Warta ILO Jakarta

Edisi Dua Bahasa, November 2014



daftar isi...

Liputan Utama.....	2
Dari Kami.....	4
Berita Foto.....	4
Wawancara.....	6
Hak-hak dalam Bekerja.....	8
Ketenagakerjaan.....	10
Gender.....	16
Pekerja Anak.....	20
Perlindungan Sosial.....	23
K3.....	24
Dialog Sosial.....	26
Cuplikan.....	32
Pojok Karyawan.....	32



Kota Mojokerto di Jawa Timur: Kota terkecil dengan inisiatif besar dan inspiratif tentang disabilitas

Kota Mojokerto di Jawa Timur mungkin kota terkecil di Indonesia, namun merupakan kota pertama di negeri ini yang mengadakan bursa kerja inklusif di tingkat kabupaten. Bursa kerja inklusif yang berlangsung selama dua hari ini diadakan pada 15-16 Oktober.

Bursa kerja inklusif ini sejalan dengan visi Mojokerto sebagai "Kota Pelayanan". Ini artinya kota ini menyediakan layanan yang berkualitas dan setara bagi semua warganya, termasuk penyandang disabilitas. "Layanan yang diberikan kepada warga Mojokerto harus sama bagi semua warga, tanpa diskriminasi apapun terhadap penyandang disabilitas," kata Drs. H. Mas'ud Yunus, Walikota Mojokerto.

Bursa kerja ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah kota Mojokerto untuk menyediakan pekerjaan layak bagi penyandang disabilitas di sektor perekonomian formal. "Melalui bursa kerja ini, perusahaan didorong untuk menyediakan lowongan kerja yang lebih luas di sektor perekonomian formal bagi penyandang disabilitas karena mereka memiliki kemampuan yang sama seperti lainnya. Mereka berhak atas kesempatan, hak dan akses terhadap fasilitas yang sama," tambah Walikota (*informasi lebih lanjut tentang komitmen Kota Mojokerto, lihat wawancara eksklusif dengan Walikota Mas'ud Yunus*).

Sekitar 40 perusahaan dari berbagai sektor berpartisipasi dalam bursa kerja ini. Sejumlah perusahaan secara khusus menawarkan lowongan kerja bagi penyandang disabilitas. Perusahaan-perusahaan ini adalah PT Intidragon Suryatama—manufaktur alas kaki, PT Bokormas—perusahaan rokok, PT Infomedia Nusantara—pemasok tenaga kerja, CV Tiara Handycraf—perusahaan border dan PT Asuransi Generaly—perusahaan asuransi.

"Perusahaan kami yakin bahwa penyandang disabilitas punya hak yang sama atas kehidupan dan pekerjaan. Selama mereka mampu melakukan pekerjaan tersebut dan ada lowongan, mengapa tidak? Persyaratan utama bagi kami adalah keterampilan dan kemampuan dalam melakukan pekerjaan," kata Pripih Erma, staf Rekrutmen dan Penilaian Sumber Daya Manusia PT Intidragon Suryatama.

Perusahaan ini menawarkan lima posisi di bidang desain grafis dan produksi, dan telah membuka lowongan ini bagi penyandang disabilitas jauh sebelum bursa kerja

“ILO sangat menghargai dan mengakui segala upaya dan inisiatif baik yang dilakukan pemerintah kota Mojokerto dalam memberikan peluang dan akses yang lebih besar bagi penyandang disabilitas terhadap, di antaranya, pendidikan, pekerjaan dan sarana umum, sebagai cara untuk memastikan inklusivitas penyandang disabilitas di tengah masyarakat”

Michiko Miyamoto

Deputi Direktur ILO di Indonesia

diadakan. Perusahaan sudah membuka lowongan inklusif ini lima tahun lalu dan telah mengembangkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan.

"Ternyata tidak mudah menemukan pekerja penyandang disabilitas. Kurangnya rasa percaya diri menjadi salah satu alasan, selain kurangnya informasi tentang lowongan ini. Kami berharap dapat merekrut lebih banyak penyandang disabilitas melalui bursa kerja ini," Pripih menambahkan.

Sementara bagi PT. Infomedia Nusantara, ini merupakan kali pertama perusahaan membuka lowongan bagi penyandang disabilitas. Infomedia adalah perusahaan sumber daya manusia yang memasok pekerja terampil untuk 100 perusahaan klien, termasuk maskapai penerbangan, bank, jasa telekomunikasi, perusahaan makanan dan minuman, BUMN dan lain-lain.

Rizky Adam, Sumber Daya Manusia PT Infomedia Nusantara, mengakui bahwa hambatan utama yang mereka hadapi dalam merekrut penyandang disabilitas adalah tingkat pendidikan. "Sebagian besar klien kami mencari lulusan akademi tapi sebagian besar pelamar dengan disabilitas hanya lulusan SMA ke bawah. Meski ada hambatan tersebut, kami ingin lebih aktif mempromosikan kesempatan kerja inklusif dengan mendorong klien kami membuka lowongan kerja yang lebih besar dan merekrut lebih banyak penyandang disabilitas."

Ribuan pencari kerja, termasuk pencari kerja dengan disabilitas, membanjiri bursa kerja ini dengan harapan memperoleh pekerjaan layak. Chrisnawati, seorang pencari kerja dengan disabilitas fisik, menyambut baik penyelenggaraan bursa kerja ini, dan berharap dapat memperoleh pekerjaan sebagai penjahit dengan gaji dan tunjangan yang sama.



© Mojokerto

Michiko Miyamoto, Deputi Direktur ILO di Indonesia (kiri), mengunjungi bursa kerja inklusif bersama dengan Drs. H. Mas'ud Yunus, Walikota Mojokerto.

“Dulu saya pernah bekerja tapi tidak diperlakukan secara adil di tempat kerja. Saya menerima gaji yang lebih kecil dan tunjangan yang lebih sedikit dibandingkan pekerja non-disabilitas. Melalui bursa kerja ini, saya berharap dapat memperoleh kesempatan kerja yang sama, termasuk perlakuan, gaji dan tunjangan yang sama.”



Drs. H. Mas'ud Yunus, Walikota Mojokerto:

“Tidak boleh ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas”

Kota Mojokerto telah memperlihatkan komitmen besar terhadap inklusivitas penyandang disabilitas di bawah kepemimpinan Anda. Apa alasan di balik semua kegiatan inspiratif ini?

Saya memandang persoalan disabilitas dari sisi kemanusiaan. Penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dan harus memiliki akses yang sama atas pendidikan dan pekerjaan. Kita perlu mendukung kesetaraan dan menghapus diskriminasi. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Mereka tidak butuh belas kasihan, mereka butuh kesempatan dan kita semua dapat memberikannya.

Bagaimana kota Mojokerto akan memastikan inklusivitas ini?

Visi Mojokerto adalah Kota Pelayanan. Ini artinya kota harus dapat melayani semua warganya secara adil, termasuk penyandang disabilitas. Karenanya kota ini kini tengah merehabilitasi sarana umum agar lebih mudah diakses dengan mewajibkan sekolah menjadi sekolah inklusif dan membangun kembali trotoar. Kami telah mengeluarkan peraturan-peraturan terkait dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung inisiatif-inisiatif ini.

Setiap tahun pemerintah kota menyelenggarakan acara yang melibatkan penyandang disabilitas di mana mereka dapat memperlihatkan kemampuan, mempertunjukkan karya serta menyampaikan aspirasi mereka. Penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan kompetensi yang sama di bidang industri kreatif, namun kita perlu memastikan keterlibatan mereka di sektor formal. Bursa kerja inklusif ini merupakan

Di samping itu, pemerintah kota Mojokerto telah melaksanakan sejumlah prakarsa untuk memastikan partisipasi penyandang disabilitas dalam semua aspek masyarakat. Dalam hal pekerjaan, pemerintah kota telah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan perusahaan lokal di sektor perekonomian formal untuk merekrut penyandang disabilitas.

Di sektor pendidikan, pemerintah telah mentransformasi semua sekolah menjadi sekolah inklusif. Sementara untuk sarana umum, pemerintah kota kini tengah membangun kembali trotoar jalan agar lebih mudah diakses. Pada 2015, trotoar akan dilengkapi dengan blok penuntun dan jalan landai (*ramp*).

Sebagai bentuk penghargaan terhadap komitmen besar yang diperlihatkan pemerintah kota Mojokerto terhadap inklusivitas penyandang disabilitas dalam masyarakat, ILO memberikan sertifikat penghargaan kepada Walikota Mas'ud Yunus.

Pemerintah provinsi Surabaya, bekerja sama dengan proyek PROPEL ILO terkait penyandang disabilitas, telah menjalin kerja sama erat dengan para walikota dalam mendukung ide bursa kerja inklusif seperti yang diselenggarakan di Mojokerto. ✿

salah satu cara untuk meningkatkan akses penyandang disabilitas terhadap sektor formal.

Dapatkah Anda menjelaskan lebih jauh tentang bursa kerja inklusif ini?

Tujuan dari bursa kerja inklusif ini adalah mendorong lebih banyak perusahaan untuk menyediakan kesempatan kerja yang lebih besar bagi penyandang disabilitas agar mereka memiliki akses yang lebih baik atas pekerjaan formal. Ada lima perusahaan peserta yang menawarkan pekerjaan inklusif dan empat di antaranya berasal dari Mojokerto.

Bursa kerja ini menyediakan sarana bagi semua pencari kerja, termasuk penyandang disabilitas, untuk mengakses informasi kerja yang bermanfaat bagi diri dan kesejahteraan mereka. Bursa kerja ini diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran di kota ini.

Di samping itu, kota telah mewajibkan semua perusahaan untuk merekrut dan mempekerjakan penyandang disabilitas. Ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat pelaksanaan peraturan nasional di tingkat kota. Pengawasan akan dilaksanakan oleh dinas tenaga kerja melalui mekanisme pengawasan yang ada.

Apa rencana di masa mendatang untuk mempromosikan inklusivitas?

Direncanakan untuk menyelenggarakan bursa kerja inklusif ini sebagai acara tahunan. Di samping itu, pemerintah kota telah menerima permintaan dari sektor swasta untuk mengadakan bursa kerja yang lebih ekstensif dan berskala nasional yang mencakup perusahaan-perusahaan dari luar Jawa Timur. ✿



Selamat datang dalam edisi terbaru Warta ILO Jakarta. Kami kini telah menerbitkan ringkasan kegiatan dan hasil kerja kami di Indonesia selama bertahun-tahun. Setiap edisi berupaya menyediakan informasi luas mengenai berbagai hal yang kami kerjakan serta kegiatan-kegiatan yang kami lakukan bersama para konstituen kami – Pemerintah Indonesia,

organisasi pekerja dan organisasi pengusaha – dalam memberikan kontribusi bagi penciptaan pekerjaan layak untuk semua orang. Edisi ini pun demikian.

Kini merupakan saat yang berbeda sejalan dengan pemerintahan baru yang baru saja dilantik, dan sedang menyelesaikan rencana pembangunan jangka menengah baru untuk periode 2015 – 2019. Kami ingin menyambut dan mengucapkan selamat kepada Menteri Tenaga Kerja yang baru. ILO berharap mempertahankan kemitraan yang telah dibangun dan terjalin dengan baik selama ini bersama Kementerian Tenaga Kerja sebagai salah satu konstituen tripartit ILO.

Di samping itu, kami akan segera memulai proses kerja bersama konstituen kami dalam merumuskan Program Pekerjaan Layak Nasional berikutnya mulai tahun 2016, sesuai prioritas yang ditetapkan konstituen kami.



Hanif Dhakiri, Menteri Tenaga Kerja yang baru

Hanif Dhakiri lahir di Brebes, Jawa Tengah, pada 1 Maret 1961. Beliau merupakan anggota DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk periode 2009 hingga 2014 dan aktif di PKB sejak tahun 1998. Seperti halnya anggota PKB, ia memiliki latar belakang dari Nahdlatul Ulama dan telah menulis sejumlah buku tentang Islam, politik dan kepemimpinan. Beliau juga aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), serta memperoleh gelar master dari Universitas Indonesia (UI). ❁

Indonesia kini merupakan negara berpenghasilan menengah. Ini bukan sekedar kata-kata. Kita melihat bagaimana negara dan kemitraan kita berkembang selama ini. Ini berarti kerja sama kita, termasuk bagaimana kita menjalin kerja sama perlu ditingkatkan pula. Ini juga membawa tantangan baru seperti mobilisasi sumber daya, yang di satu sisi menawarkan kesempatan untuk, misalnya, memberikan kontribusi dalam membuat perubahan mengenai masalah ketenagakerjaan guna meningkatkan pekerjaan layak bagi semua orang di negeri ini.

Saya menantikan ini semua. ❁

© UN



berita foto

▲ Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, bertemu dengan para anggota Tim Badan PBB (UN Country Team) Indonesia selama konferensi UN Alliance of Civilizations di Bali pada 29-30 Agustus. Salah satu topik yang dibahas adalah bagaimana bekerja sebagai PBB di negara-negara berpenghasilan menengah seperti Indonesia.

Empat Kementerian Sepakat Hentikan Diskriminasi di Tempat Kerja

27 August 2014 menandai langkah penting dalam menghapus diskriminasi di tempat kerja. Empat kementerian—Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)—telah menandatangani Nota Kesepahaman untuk memperkuat kemitraan mereka dalam mengurangi diskriminasi di tempat kerja.

Setelah acara penandatanganan Nota Kesepahaman ini yang dihadiri sekitar 500 peserta, termasuk 34 perwakilan daerah, Kementerian Tenaga Kerja meluncurkan Satuan Tugas (Satgas) Kesetaraan Kesempatan Kerja yang akan dibentuk di tingkat provinsi sebagai upaya mendukung kesetaraan di tempat kerja. Saat ini, Satgas Kesetaraan ini hanya ada di tingkat nasional.

Irianto Simbolon, Direktur Jenderal Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Tenaga Kerja, mengatakan bahwa tujuan utama dari Nota ini adalah membentuk Satgas Kesetaraan di tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan. "Tujuan Satgas adalah memastikan semua pekerja menikmati kesetaraan hak atas kondisi kerja yang sama di semua tingkatan."

Sementara itu, Sulikanti Agusni, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Pengarusutamaan Gender di sektor Ekonomi, menyatakan bahwa banyak perempuan di Indonesia masih mengalami ketidaksetaraan dalam hal pekerjaan kendati Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dan Konvensi ILO No. 100 dan 111 tentang Penghapusan Diskriminasi dalam hal Pekerjaan dan Jabatan.

Di samping itu, Rahma Iryanti, Deputi Menteri Negara Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM - Bappenas, menjelaskan bahwa pada tahun 2013 hanya sekitar 209.512 perempuan memegang posisi penting di berbagai sektor, atau hanya 18 persen dari total 1,1 juta pekerja di tingkat manajer.

Kendati demikian, Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dalam meningkatkan kondisi sumber daya manusia (SDM) dalam 40 tahun terakhir. Aya Maatsura, Spesialis Gender ILO, mengungkapkan bahwa Indonesia termasuk salah satu dari 10 negara terbaik di dunia dengan tingkat kemajuan tercepat dalam perbaikan kondisi SDM sesuai Laporan UNDP tentang Pembangunan SDM tahun 2011.

© ILO Jakarta/A. Mirza



▲ Seorang pekerja perempuan di perusahaan elektronik

“Indonesia perlu memberi perhatian lebih besar kepada perempuan. Kesetaraan gender harus terwujud dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Tidak terpenuhinya salah satu dari keempat faktor tersebut menunjukkan adanya ketidaksetaraan di tempat kerja atau di sektor pekerjaan”

Sulikanti Agusni

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Pengarusutamaan Gender di sektor Ekonomi

Dalam hal angkatan kerja, pangsa upah kerja perempuan di sektor non pertanian juga mengalami peningkatan dari 29,24 persen pada 1990 menjadi 33,45 persen pada 2009. Meskipun demikian, kesenjangan gender masih tetap terjadi di bidang sosial dan ekonomi.

Selama tahun 2012 dan 2013, tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki berkisar antara 84 hingga 85 persen, sementara tingkat partisipasi perempuan berkisar antara 50 hingga 53 persen.

Segregasi pekerjaan masih menjadi kendala, di mana perempuan kurang terwakilkan dalam jenis pekerjaan berupah tinggi dan jabatan manajerial senior. Proporsi pekerja di sektor pekerjaan rentan terbilang lebih tinggi di kalangan perempuan, yaitu sebesar 65 persen, dibandingkan 57 persen untuk laki-laki, dengan lebih tingginya presentase perempuan sebagai pekerja keluarga tanpa upah dibandingkan laki-laki yang terbilang tinggi sebagai pekerja mandiri.

Di Indonesia, perempuan juga memperoleh upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dan kesenjangan upah terjadi di kalangan pekerja dengan tingkat pendidikan rendah; 35,54 persen untuk mereka yang tidak tamat SD dan 36,42 persen untuk mereka yang tamat SD.

Untuk menjawab masalah diskriminasi gender ini, banyak negara telah menetapkan mekanisme khusus untuk memerangi diskriminasi di pasar kerja serta mempromosikan diversitas dan kesetaraan gender. Dengan peluncuran Satgas Kesetaraan ini, Pemerintah Indonesia telah bergabung dengan sejumlah negara di Asia yang telah mengambil langkah praktis untuk mempromosikan kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pekerjaan. ❁



Abdul Wahab Bangkona,

Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja:

“Dengan Formula Tripartit, Program SCORE Bisa Menjadi Gerakan Nasional”

Berdasarkan kesuksesan penerapan program Kesenambungan Daya Saing dan Tanggung Jawab Perusahaan (SCORE) tahap pertama, Kementerian Tenaga Kerja, bersama dengan serikat pekerja dan organisasi pengusaha, meluncurkan tahap kedua program SCORE pada Mei di Jakarta. Didukung ILO, peluncuran ini juga menandai pengadopsian program SCORE secara nasional.

Program SCORE merupakan program global yang awalnya dirancang oleh ILO dan kemudian dikembangkan dan dilaksanakan melalui kerjasama tripartit—Kementerian Tenaga Kerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Konfederasi Serikat Pekerja. Program SCORE ini didanai Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO) dan Badan untuk Kerjasama Pembangunan Nowergia (NORAD).

Program SCORE dirancang untuk membantu usaha kecil menengah (UKM) di dunia, termasuk di Indonesia, melalui peningkatan mutu dan produktivitas, peningkatan kondisi kerja yang sehat dan aman, pengurangan jejak kaki lingkungan (environmental footprints) serta penguatan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja.

Untuk mendalami lebih lanjut komitmen menjadikan program SCORE sebagai gerakan nasional, ILO mewawancarai Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja, Abdul Wahab Bangkona:

T: Bisa dijelaskan apa itu program SCORE?

J: Program SCORE ini adalah program tripartit yang melibatkan langsung pekerja, pengusaha, pemerintah, bekerja sama dengan fasilitasi ILO, yang fokus kepada peningkatan kerja sama di tempat kerja, peningkatan manajemen kualitas, pengelolaan perusahaan, produksi bersih, manajemen sumber daya manusia dan penerapan K3 di perusahaan. Sehingga dengan penerapan seluruh fungsi ini diharapkan produktivitas usaha kecil menengah akan meningkat secara signifikan.

T: Apa tujuan dari penerapan program SCORE?

J: Dengan penerapan fungsi-fungsi yang dikembangkan melalui program SCORE ini, kita harapkan pada gilirannya nanti seluruh UKM di Indonesia ini, mengelola usahanya secara efektif dan efisien, tentu disertai dengan peningkatan kualitas. Dengan demikian bisa bersaing, terutama dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN. Karenanya standar kualitas ini menjadi penting.

Untuk itu kita mengharapkan seluruh pemangku kepentingan serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendiseminasikan program ini secara bersama-sama. Dengan formula tripartit, program SCORE atau kegiatan-kegiatan yang diterapkan melalui program SCORE ini bisa menjadi gerakan nasional.

T: Apa saja pencapaian program SCORE selama ini?

J: Kita telah melakukan proyek percontohan. Sebanyak 90 UKM sudah berhasil kita bimbing dan bina melalui program SCORE ini dan melibatkan 336 tenaga kerja. Diharapkan di tahun 2014 ini akan kita laksanakan lagi di 10 provinsi sehingga di setiap provinsi akan ada kisah sukses yang bisa menjadi pusat diseminasi dari program SCORE ini. Mudah-mudahan melalui cara ini memudahkan masyarakat untuk melihat praktik-praktik terbaik yang sudah dilaksanakan.

T: Menurut Anda, apa kaitan SCORE dengan produktivitas nasional?

J: Melihat hasil yang sudah dicapai, kita yakin bahwa dengan mendiseminasikan, mensosialisasikan dan menularkan kepada seluruh UKM, dipercaya akan meningkatkan produktivitas secara nasional. UKM mempunyai proporsi yang terbesar di Indonesia.

Untuk itu kita berharap SCORE bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia dalam waktu yang tidak terlalu lama. Untuk mewujudkannya semua pemangku kepentingan harus berpartisipasi aktif dalam mengawal dan menjadi inisiator, motivator, dan fasilitator dalam penerapannya.

T: Apa pesan Anda tentang SCORE kepada kami?

J: SCORE ini adalah akselerator peningkatan produktivitas, sehingga semua harus menjadikan SCORE sebagai salah satu instrumen untuk diterapkan secara efektif dan konsisten di seluruh wilayah Indonesia, seluruh tempat kerja, tidak terkecuali di lembaga-lembaga pemerintah. SCORE ini adalah untuk produktivitas, produktivitas adalah peningkatan pendapatan, sehingga SCORE adalah instrumen untuk peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan. Semua harus bersama-sama mengawal penerapan SCORE ini. 🌟

Pengawas Ketenagakerjaan Pastikan Penerapan Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja

Dua puluh delapan pengawas ketenagakerjaan dari 20 provinsi di Indonesia berkumpul di Bogor untuk berpartisipasi dalam pelatihan empat hari mengenai prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja, yang diselenggarakan pada 29 September-30 Oktober. Pelatihan ini bertujuan mengembangkan kapasitas pengawas ketenagakerjaan agar mereka dapat memastikan kepatuhan para pekerja dan pengusaha dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut di tempat kerja.

“Penting bagi pengawas ketenagakerjaan untuk sepenuhnya memahami mekanisme pelaksanaan semua standar ketenagakerjaan utama ILO yang telah diratifikasi Indonesia, agar mereka dapat memastikan kepatuhan di tingkat perusahaan”

Mochtar Lutfie

Direktur Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja

Michiko Miyamoto, Deputy Direktur ILO Jakarta, menegaskan peran penting yang dimainkan pengawas ketenagakerjaan terkait pelaksanaan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja. “Memperkuat sistem pengawasan ketenagakerjaan melalui peningkatan kapasitas pengawas ketenagakerjaan merupakan kunci untuk menghormati prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja dalam lingkungan kerja.”

Selama sesi-sesi pelatihan ini, para peserta aktif berbagi pengalaman dalam mengawasi persoalan ketenagakerjaan yang terkait dengan kebebasan berserikat dan perundingan bersama, pekerja anak, kerja paksa dan diskriminasi. Masalah paling umum yang mereka temukan adalah masalah pekerja anak dan pelanggaran kebebasan berserikat.

“Sebagai pengawas ketenagakerjaan, kita semua ingin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang persoalan-persoalan terkait kerja paksa dan non-diskriminasi. Persoalan-persoalan ini sering terjadi di tingkat perusahaan, tapi tidak mudah membuktikannya karena memang sulit dibuktikan,” ujar salah seorang peserta.

Pentingnya koordinasi yang baik juga disampaikan dalam forum ini. Para peserta membahas pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam mengumpulkan informasi dan data untuk mendukung kasus-kasus yang ditangani pengawas ketenagakerjaan. “Kurangnya koordinasi mempersulit tugas kami dalam menangani kasus. Kami butuh bantuan dari kedua tingkatan pemerintah,” kata para peserta.

Pelatihan ini diadakan atas permintaan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). Pelatihan ini difasilitasi para spesialis dan staf ILO dari kantor regional dan Jakarta, serta staf dan perwakilan terkait dan Kemenaker, organisasi pekerja dan pengusaha. 🌟

Pendidikan Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia

Diperkirakan sekitar 6,5 juta tenaga kerja Indonesia (TKI) saat ini bekerja di luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Hongkong, Taiwan, dan negara-negara Timur Tengah. Indonesia merupakan negara pengirim pekerja migran terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Filipina. Hal ini menempatkan migrasi kerja sebagai sektor ekonomi yang strategis karena penerimaan dana dari luar negeri, yang tidak diragukan lagi menjadi devisa terbesar kedua di negeri ini setelah minyak dan pertambangan.

Berbagai upaya perlu dilakukan agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan remitansi TKI, termasuk dengan meningkatkan kesadaran masyarakat serta memperkuat kapasitas TKI tentang pemanfaatan remitansi yang efektif. Menyikapi hal ini, Bank Indonesia (BI) mengundang ILO untuk menjadi bagian dari tim pengembangan manual tentang pendidikan keuangan bagi pekerja migran Indonesia.

Di samping ILO, BI juga melibatkan partisipasi lembaga pemerintah dan LSM terkait untuk menyusun buku manual bersama yang diberi judul "Pendidikan Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia". Organisasi-organisasi lain yang ikut dilibatkan antara lain adalah Kementerian Tenaga Kerja, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Bank Dunia, Yayasan Tifa dan sejumlah bank nasional.

"Manual ini diharapkan dapat digunakan sebagai panduan praktis bagi TKI dan keluarga mereka dalam mengelola keuangan dan memanfaatkan remitansi. Dalam manual ini, ILO memberikan kontribusi pada bab-bab tentang "Pengelolaan Keuangan" dan "Asuransi Pekerja Migran"

“ Pengetahuan dan kesadaran masyarakat, termasuk komunitas pekerja migran, tentang masalah pengelolaan keuangan masih rendah. Akibatnya, ini akan membatasi kapasitas mereka dalam mengelola penghasilan, investasi yang produktif dan mitigasi risiko masalah-masalah keuangan dan kebiasaan menabung ”

Eni V. Panggabean

Direktur Eksekutif Departemen Pengembangan Akses, Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dan Medium (DPAU) BI

yang menyediakan panduan tentang cara menyusun catatan keuangan dan pengenalan asuransi serta asuransi pekerja migran, termasuk langkah-langkah yang perlu diambil untuk mempersiapkan klaim asuransi," jelas Irham Saifuddin, Staf ILO.

Saat ini manual tersebut sudah difinalisasi dan validasi. Hingga akhir tahun 2014, manual ini akan digunakan dalam pelatihan untuk pelatih yang diadakan di Balai Latihan Kerja TKI (BLKLN) di Jakarta dan sekitarnya dan di Malang, Jawa Timur. Sedangkan untuk penerapannya di masa mendatang, Pemerintah Indonesia melalui BI, Kementerian Tenaga Kerja dan BNP2TKI berencana menggunakan manual ini sebagai paket pelatihan wajib yang dimasukkan dalam pelatihan pra keberangkatan bagi semua calon TKI. Dengan demikian, calon TKI diharapkan memiliki keterampilan yang dibutuhkan, terutama dalam mengelola dan merencanakan penghasilan mereka saat bekerja di luar negeri.

Terkait masalah pentingnya pendidikan keuangan bagi TKI, Irham menyimpulkan bahwa "pendidikan keuangan memiliki dua dimensi penting bagi TKI: meningkatkan perlindungan TKI karena memperkenalkan mitigasi risiko berbasis hak serta memperkuat kapasitas dasar TKI dan keluarga mereka dalam merencanakan dan mengelola migrasi, penghasilan serta investasi mereka di masa mendatang yang dapat membantu mereka mempersiapkan diri dalam menyongsong masa depan yang lebih baik." ❁

▲ Tempat penukaran dan pengiriman uang di Hongkong

Mempromosikan Migrasi Kerja Terampil Lintas Batas di Kawasan ASEAN

Upaya untuk memperkuat pengakuan atas keahlian pekerja lintas batas dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dibahas oleh perwakilan tingkat tinggi negara-negara anggota ASEAN di Jakarta yang diselenggarakan pada 24- 25 September.

Pertemuan dua hari ini membahas tentang pengakuan bersama atas keahlian, setelah MEA diberlakukan pada tahun 2015, serta mengembangkan sejumlah rencana aksi melalui diskusi antara pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha.

Abdul Wahab Bangkora, Sekretaris Jenderal, Kementerian Tenaga Kerja Indonesia, menegaskan perlunya harmonisasi standar kompetensi antar negara anggota ASEAN. "Kita perlu menyelaraskan standar kompetensi kita serta mencari model yang dapat digunakan oleh kita semua. Karenanya, saya sangat menghargai pertemuan ini karena kita perlu mempromosikan pengakuan bersama atas keahlian," katanya, seraya menambahkan bahwa sebagian besar standar kompetensi Indonesia mengacu pada Australia dan Selandia Baru.

Dihadiri perwakilan dari pemerintah ASEAN, organisasi pekerja dan pengusaha, lokakarya ini memainkan peran penting dalam membantu negara-negara anggota ASEAN membuat pengakuan bersama atas keahlian. Acara ini diselenggarakan oleh Program Keahlian Regional ILO, yaitu proyek ILO yang bertujuan untuk meningkatkan migrasi kerja di kawasan ASEAN (ASEAN TRIANGLE), Kantor ILO untuk Indonesia, dan Kementerian Tenaga Kerja Indonesia. Acara ini didukung oleh Pemerintah Kanada dan Program Kemitraan ILO/Korea.

"Kami berharap dapat mengurangi eksploitasi terhadap pekerja migran di kawasan ini melalui peningkatan migrasi yang legal dan aman serta pengakuan bersama mengenai keahlian sebagai bagian dari pengembangan perangkat perlindungan hak," kata Manuel Imson, Staf Senior/ Koordinator Proyek ASEAN TRIANGLE.

Dalam hal pengakuan keahlian bersama ini, ILO telah memberikan bantuan teknis dan layanan dalam berbagai bentuk. Bantuan ini mencakup pengembangan Model

© ILO Jakarta



▲ Para peserta membahas mengenai pentingnya pengakuan keterampilan bersama

“ Pengakuan bersama mengenai keahlian ini merupakan perangkat utama dalam mobilisasi pekerja ahli dan terampil terkait keahlian teknis/vokasional di ASEAN. ILO, sebagai pelaku utama dalam permasalahan dunia kerja, akan tetap berkomitmen memberikan dukungan teknis guna memastikan terwujudnya pekerjaan yang layak dalam tujuan MEA 2015 **”**

Carmela Torres

Spesialis Senior ILO mengenai Keterampilan dan Kemampuan Kerja

Standar Kompetensi Regional yang telah dipergunakan sebagai acuan dari pengembangan standar keterampilan dan keahlian nasional di kawasan ini, serta kegiatan mendorong mekanisme pengakuan bersama mengenai keahlian ini di Negara-negara sub-regional Mekong dan sekitarnya (the Greater Mekong Sub-regional/ GMS). Di samping itu, hasil "Kajian Kesiapan Negara-negara anggota ASEAN dalam Pelaksanaan Komitmen Arus Bebas Tenaga Kerja Terampil

dalam MEA pada 2015" telah dipublikasikan.

Sebelumnya, lokakarya validasi dan penyusunan rencana aksi telah diadakan, bersama staf senior ASEAN dan penanggungjawab bidang keahlian ini guna mengidentifikasi sektor-sektor keterampilan dan keahlian sebagai prioritas. Sektor-sektor keahlian yang sudah diidentifikasi ini selanjutnya dipaparkan kepada para pengusaha dalam rapat regional Pengusaha ASEAN yang diadakan pada Oktober 2013.

Sekretariat ASEAN secara aktif terlibat dalam rapat-rapat konsultasi dan memainkan peran penting dalam mengembangkan Kerangka Kerja Kualifikasi Regional ASEAN (AQR).

"Kerjasama di antara pemangku kepentingan merupakan kunci kesuksesan yang penting," Kata Peter van Rooij, Direktur ILO di Indonesia. "Prakarsa ini dikembangkan melalui dukungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia, yang memainkan peran penting dalam pengembangan keahlian." ❁

Mendorong Daya Saing Usaha Kecil Sektor Pariwisata di Indonesia

Dukungan terhadap kewirausahaan kini semakin penting, sejalan dengan diterapkannya Kesepakatan Perdagangan Bebas ASEAN pada tahun 2015. Semua negara ASEAN, termasuk Indonesia, perlu segera memperkuat angkatan kerjanya dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing, termasuk bagi pengusaha mikro dan kecil menengah yang mencakup lebih dari 90 persen dari semua perusahaan yang ada di negeri ini.

Namun, pendidikan kewirausahaan yang berkualitas masih belum dapat diakses oleh masyarakat marjinal. Hambatan ini biasanya diakibatkan minimnya tenaga pelatih dan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk memobilisasi pelatih yang memenuhi syarat, terutama ke daerah-daerah terpencil. Produk pengetahuan yang berkualitas biasanya “terkunci” pada satu bahasa tertentu di negara tersebut dan umumnya terhambat oleh hak cipta sehingga sulit atau mungkin mustahil untuk direplikasi dan disesuaikan dengan konteks masyarakat setempat.

Guna meningkatkan daya saing usaha mikro dan kecil menengah, ILO merancang metodologi pelatihan berbasis masyarakat (C-BED) yang dibangun berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pengusaha tanpa harus mengundang pelatih atau narasumber dari luar. Metode pembelajaran partisipatif ini memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mempelopori dan menggunakan modul, bahkan bagi peserta yang buta huruf sekalipun.

Didanai Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF), perangkat C-BED untuk sektor pariwisata ini dikembangkan ILO melalui Program Daya Saing Usaha Kecil ASEAN bekerja sama dengan Sekretariat ASEAN dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Program ini bertujuan untuk menyediakan serangkaian perangkat bagi negara-negara ASEAN dalam mengembangkan dan meningkatkan UKM dan mikro/tertentu di sejumlah sektor, yang menyediakan panduan bagi pengusaha dan pihak yang bekerja sama dengan mereka tentang cara mendirikan, mengelola dan meningkatkan usaha – dengan meningkatkan daya saing dan pelayanan mereka.

Diluncurkan pada 2013, program ini akan berjalan selama dua tahun hingga 2015.

Dalam mengujicoba perangkat-perangkat ini, Sumatera Barat dipilih sebagai salah satu lokasi. Sumatera Barat diberkahi dengan kekayaan sumber daya alam dan budaya—serta antusiasme yang tinggi dari sektor swasta dan publik untuk memperkenalkan potensi pariwisata Sumatera Barat kepada dunia, yang sedang mencari pasar pariwisata yang baru. Dengan



Apa Kata Mereka

“Perangkat ini efektif karena bersifat partisipatif dan interaktif. Ia dirancang untuk kelompok-kelompok kecil, di mana setiap orang merasa nyaman dalam menyampaikan pandangan mereka dan ia merupakan sumber informasi yang penting bagi orang lain.”

Zuhrizul,

Fasilitator Pelatihan dan Praktisi Pariwisata dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

“Saya akan membawa perangkat tentang Pengelolaan Daerah Tujuan Wisata dan Pemilik Rumah Inap ini ke Kepulauan Mentawai untuk diperkenalkan kepada para pemangku kepentingan lokal. Kami sebagai pihak pemerintah tidak mampu dan tidak punya waktu untuk mengembangkan produk-produk seperti ini dan kami sangat menghargai akses yang diberikan kepada kami.”

Desti Seminora,

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Mentawai.

tujuan mengembangkan potensi pariwisatanya, pemerintah provinsi kini mengeksplorasi potensi pasar baru untuk turis.

Serangkaian lokakarya percontohan diadakan dari 13-23 Oktober untuk mengujicoba tiga perangkat yang baru saja dikembangkan. Lokakarya percontohan bagi para pemilik rumah inap diadakan di Sawahlunto; bagi pembuat kerajinan songket di Padang; juga di Padang diadakan kerjasama publik-swasta lintas sektoral tentang pengelolaan daerah tujuan wisata. Diselenggarakan Kantor Regional Bank Indonesia di Padang, lokakarya percontohan tentang Pengelolaan Daerah Tujuan Wisata ini dibuka dengan sebuah diskusi panel di mana Gubernur Sumatera Barat menyampaikan optimismenya terhadap pengembangan potensi pariwisata di Sumatera Barat.

▼ Para pemilik usaha kecil berpartisipasi dalam rangkaian lokakarya di Sumatera Barat



“Pegawai pemerintah jarang diberi kesempatan untuk duduk bersama dengan sektor swasta dari industri penerbangan, agen perjalanan, kalangan akademisi, dan dinas pemerintah lain. Modul Daerah Tujuan Wisata ini memungkinkan kami untuk duduk bersama dan mengadakan diskusi terstruktur tentang cara mengembangkan dunia pariwisata. Pemakaian perangkat ini akan disebarluaskan ke seluruh kabupaten di Sumatera Barat tahun depan.”

Aprimas,

Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumatera Barat. ❁

“*Delapan perangkat modul tengah dikembangkan tahun ini. Setiap perangkat ditujukan untuk beberapa bagian usaha mikro di sektor pariwisata, seperti perangkat tentang rumah inap (homestay), penginapan (guest house) dan kerajinan tangan. Di samping itu, satu perangkat sektoral juga dikembangkan, yaitu tentang Pengelolaan Daerah Tujuan Wisata*”

Nurvitria M. Křiřtofíková

Manajer Proyek ILO untuk Program Daya Saing UKM ASEAN

Di samping partisipasi para pemilik rumah inap dan pembuat kerajinan tangan dari beberapa kabupaten di Sumatera Barat, lokakarya percontohan Pengelolaan Daerah Tujuan Wisata ini juga dihadiri perwakilan sektor swasta seperti Garuda Indonesia, Angkasa Pura Group, Blue Bird Group, HIN group, agen wisata lokal dan perusahaan transportasi, rantai perhotelan, anggota asosiasi pengusaha restoran dan asosiasi pariwisata (misalnya ASITA, PHRI, HPI), pegawai pemerintah (kepala dinas pariwisata dan budaya, dinas koperasi dan UKM tingkat provinsi dan lokal), dinas perencanaan tata ruang, dinas pekerjaan umum dan dinas umum, serta kalangan akademisi yang difokuskan pada pengelolaan pariwisata dan agro-turisme. Para peserta memperlihatkan antusiasme mereka yang tinggi dalam menggunakan perangkat tersebut.

“Perlu disadari bahwa jenis produk pengetahuan ini sangat penting, dan kita jarang memperoleh akses terhadap produk-produk ini secara gratis,” kata Rudolf Smit, seorang konsultan pariwisata senior yang berpartisipasi dalam lokakarya percontohan tentang Pengelolaan Daerah Tujuan Wisata.

“Para peserta lokakarya percontohan mengenai kerajinan tangan dan rumah inap ini adalah pemilik usaha, yang hadir dengan harapan memperoleh wawasan tentang bagaimana mengembangkan usaha mereka serta

bagaimana mereplikasi inisiatif-inisiatif tersebut di daerah mereka. Dengan adanya kombinasi peserta yang baik ini, perangkat Pengelolaan Daerah Tujuan Wisata diharapkan dapat menjalin dialog antara sektor swasta dan publik dalam menetapkan peta panduan pengelolaan pariwisata di Sumatera Barat,” tambah Nurvitria.

Saat ini, sejumlah proyek percontohan serupa juga diadakan di Laos, Thailand dan Bali—untuk menguji efektivitas perangkat yang dikembangkan di lapangan. Kelompok Kerja UKM ASEAN secara aktif terlibat dalam mengembangkan perangkat ini. ❁

Pengusaha Muda Indonesia Peduli Lingkungan



Ilham Rhamanda mungkin merupakan salah seorang pengusaha yang paling bahagia di Bandung. Sebagai pengusaha muda yang sukses, ia dan saudaranya mengelola pabrik pakaian olahraga yang sudah mapan dan berkembang pesat, serta terkenal akan rancangan orisinilnya. Mereka memiliki 12 pekerja dan memasok pakaian olahraga ke sejumlah pusat perbelanjaan di ibukota Jawa Barat. Tapi entah mengapa bila melihat masa depan, pengusaha berusia 34 tahun dan ayah dari seorang anak perempuan berusia 2 tahun ini masih merasa belum puas.

Suatu hari ia melihat limbah air mengalir keluar dari pabriknya dan masuk ke kali kecil di sekitar pabrik. Ia tahu pabrik pakaian olahraganya, seperti halnya usaha kecil menengah (UKM) lain, berkembang dengan mengorbankan kualitas lingkungan, dan menimbulkan banyak limbah, sampah dan polusi industri. Sehingga menciptakan bisnis yang menguntungkan dan ramah lingkungan tampaknya merupakan "teka-teki besar" baginya.

Oleh karena itu, saat diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan Start Your Green Business (SYGB), yang diselenggarakan ILO, Ilham langsung menerimanya. "Praktik bisnis yang baik perlu mempertimbangkan aspek lingkungan dan masyarakat, dan bukan sekedar memikirkan keuntungan semata," katanya. "Karena ia sangat penting bagi kelangsungan pertumbuhan bisnis kita."

"Pendapat tradisional menyatakan 'sejahtera dulu, bersihkan nanti' tapi kita tidak dapat terus sejahtera jika kita merusak lingkungan, atau jika kita tidak memperhatikan pekerja kita," kata Lorraine Villacorta, Spesialis bidang Lingkungan dan Pekerjaan Layak ILO. "Untungnya, para pengusaha, terutama

pengusaha muda di Indonesia, sudah menyadari hal itu. Apa yang mereka butuhkan adalah pengetahuan dan keahlian untuk mempraktikkan ide mereka. Dan disitulah ILO hadir."

Lorraine menyatakan bahwa "ramah lingkungan" tidak saja berarti mengurangi dampak bisnis terhadap lingkungan tapi juga memenuhi standar pekerjaan layak, seperti kondisi kerja yang aman, upah yang memadai, pemenuhan hak pekerja, dialog sosial dan perlindungan sosial. Selama pelatihan SYGB ini, pelatih menjelaskan tentang prinsip, kebijakan dan praktik ini. Mereka membantu Ilham dan rekan pengusaha lain untuk mengusulkan sejumlah ide tentang bisnis yang ramah lingkungan, termasuk di bidang pangan dan pertanian, pariwisata, pengelolaan limbah dan daur ulang, energi terbarukan dan industri kreatif.

Pelatihan ini membantu Ilham menemukan solusi untuk limbah beracun dan bahan kimia yang keluar dari pabriknya. Pelatihan ini menyediakan panduan tentang cara memasang saringan atau filter yang terbuat dari palem fiber, karbon aktif dan kotak sedimentasi untuk menghilangkan kotoran dan limbah yang dihasilkan dari *washing screen prints*, tinta dan cairan kimia serta mencegah air limbah yang belum diproses masuk ke saluran dan kali di sekitarnya.



ILO, bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengadakan proyek percontohan pengembangan kewirausahaan bersama menggunakan modul Memulai Usaha Anda (SYB) ILO selama enam bulan pada Juni hingga Desember 2013. Proyek percontohan yang diadakan di tiga kota (Yogyakarta, Semarang dan Solo) ini bertujuan untuk mendukung Kemenaker dan Apindo dalam menciptakan model pengembangan kewirausahaan menggunakan modul SYB yang akan direplikasi di tingkat nasional oleh Kemenaker pada 2014.

Selama proyek percontohan ini, 60 pengusaha muda potensial (20 peserta dari setiap kota) mengikuti pelatihan dan dibantu memulai dan mengembangkan usaha mereka. Salah satu dari mereka adalah Yoi Yohanantoko dari Yogyakarta yang telah mengembangkan usaha alas kaki dari kulit dengan nama "Bucini Footwear: The Beauty

Harga filter terjangkau, mudah dipasang dan dioperasikan, ini berarti harga produk masih kompetitif. Pekerja juga merasa lebih senang.

Ia sudah mulai mempromosikan aspek 'hijau' dari bisnisnya dan sedang memikirkan ide

baru, seperti pemakaian tinta yang ramah lingkungan untuk *screen printing*. "Rencana saya yang lain adalah lebih menghijaukan bisnis saya dengan mengembangkan merek sendiri menggunakan bahan mentah organik dan tinta alami," katanya. Untuk jangka panjang, ia ingin memperluas bisnisnya dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi warga setempat.

Pelatihan ini juga menawarkan jaringan dan peluang usaha penting bagi pengusaha muda. Ilham kini menjual kain perca ke perusahaan lain, yang memproduksi aksesoris jilbab dan busana perempuan.

Sejauh ini, pelatihan SYGB telah membantu hampir 200 pengusaha di enam provinsi di Indonesia untuk mengimbangi ambisi bisnis mereka dengan masalah perubahan iklim dan lingkungan sekitar mereka, dengan menghasilkan produk-



“Kegiatan bisnis saya sudah tidak membahayakan lingkungan lagi dan warga setempat dapat menikmati air bersih. Sekarang, saya tidak perlu khawatir, demikian pula halnya pelanggan kami”

Ilham Rhamanda

Wirausaha Muda

produk ramah lingkungan atau dengan menggunakan proses produksi yang ramah lingkungan.

“Semakin banyak pengusaha muda seperti Ilham yang berpikir jangka panjang dan ingin menerapkan pendekatan yang lebih berkelanjutan terhadap bisnis mereka,” kata Peter van Rooij, Direktur ILO untuk Indonesia. “Mereka tahu perekonomian Indonesia berkembang pesat selama beberapa tahun belakangan ini tapi perkembangan tersebut mempengaruhi lingkungan hidup, dan mereka ingin maju dengan cara berbeda. Dengan senang hati ILO membantu dan mendukung perekonomian yang lebih hijau, dan berkelanjutan.”

Pelatihan SYGB didukung oleh Program Kemitraan ILO/ Korea melalui Program Ramah Lingkungan (*Green Jobs*) untuk kawasan Asia Pasifik. ❁

Mengubah limbah kulit menjadi bisnis alas kaki yang menguntungkan

of Leather.” Ia dipilih dari 100 pelamar lebih dan terbukti mampu mengembangkan usahanya. Berikut kisahnya:

“Saya berasal dari keluarga pengusaha. Keluarga saya dulu memproduksi tas kulit dengan merek M-Joint. Saya melihat banyak sekali tumpukan limbah kulit, jadi saya terpikir untuk membuat alas kaki terbuat dari kulit agar bisa memanfaatkan limbah tersebut. Limbah kulit ini biasanya dibuang karena dianggap tidak bernilai. Sementara sepatu tidak membutuhkan banyak kulit seperti tas, dan limbah ini akan menjadi produk yang bernilai jika saya dapat mengubahnya menjadi produk seperti sepatu.

“Saya kemudian belajar tentang cara membuat sepatu melalui internet karena saya sama sekali tidak tahu cara pembuatan sepatu. Namun, saya yakin kita dapat belajar apa saja dan kita dapat melakukan apa saja yang kita yakini. Saya meluangkan waktu untuk mencari informasi dan belajar proses pembuatan alas kaki. Dari apa yang saya pelajari, saya mulai mengembangkan produksi sendiri dengan merek “Bucini Footwear: the Beauty of Leather.” Nama Bucini adalah nama nenek saya yang selalu memberi inspirasi untuk mengembangkan usaha sendiri.

“Namun, saat mulai mengembangkan usaha, saya menghadapi situasi sulit. Saya sadar bahwa ide dan pengetahuan usaha saja tidaklah cukup. Dibutuhkan lebih dari itu untuk bisa

mengembangkan usaha. Kadang-kadang saya bingung apa yang perlu saya lakukan untuk mempertahankan usaha. Untungnya, saya terpilih mengikuti kegiatan Pelatihan Kewirausahaan ILO bersama 19 pengusaha muda lain dari Yogyakarta.

“Dalam pelatihan ini, saya belajar banyak tentang cara membuka dan mengembangkan usaha. Saya juga belajar tentang perencanaan usaha, perencanaan keuangan, pembelian, pembiayaan, pengepakan, pemasaran dan promosi. Setelah pelatihan, saya menerima bantuan pasca pelatihan yang membantu saya meningkatkan dan memperluas jaringan usaha alas kaki saya. Alhasil, pendapatan saya pun meningkat dari Rp. 18 juta menjadi Rp. 40 juta per bulan. Pada akhir tahun 2014, ditargetkan untuk meningkatkan pendapatan saya menjadi Rp. 60 juta. Saya merintis hanya dengan dua pekerja, dan sekarang sudah memiliki 15 pekerja yang memproduksi 400 pasang alas kaki per bulan.

“Saya berharap pengalaman usaha saya dapat memberi inspirasi kepada para pengusaha muda lain. Saya juga berharap program SYB dapat menjangkau lebih banyak pengusaha agar usaha mereka dapat berkembang. Di samping itu, usaha saya juga terbuka bagi pengusaha lain yang mau belajar cara mengelola dan mengembangkan usaha sebagian bagian dari misi saya agar bermanfaat bagi orang lain.” ❁

Nongkojajar di Jawa Timur terus memperluas Atraksi Wisatanya

Semakin banyak turis dan pengunjung, dari dalam maupun luar negeri, yang singgah di kecamatan Tukur atau juga dikenal sebagai Nongkojajar di Kabupaten Pasuruan sebelum melanjutkan perjalanan mereka melihat keindahan Gunung Bromo di Jawa Timur, Indonesia. Pasuruan adalah salah satu kabupaten yang disinggahi para turis dan pengunjung saat mengunjungi Gunung Bromo.

Sebelumnya sebagian besar turis dan pengunjung lebih suka melewati jalur lain seperti Lumajang, Probolinggo dan Malang. Namun segalanya berubah setelah Nongkojajar berubah menjadi lokasi agrowisata yang menawarkan lebih banyak kedai kopi, rumah inap (*home stays*) dan atraksi wisata.

Nongkojajar juga dilengkapi dengan Pusat Informasi Pariwisata Nongkojajar, yang dibangun sebagai pusat atraksi dan wisata. "Pusat informasi ini dibangun dengan bantuan ILO pada 2010, dan empat tahun kemudian masih aktif beroperasi dan lebih profesional," kata Rudi Cahyono, Manajer Pusat Informasi Pariwisata Nongkojajar.

Dengan 10 orang staf, Pusat informasi mengembangkan sejumlah paket wisata bekerja sama dengan tempat penginapan, kelompok tani serta perusahaan setempat lainnya. Atraksi baru juga dikembangkan, seperti olahraga arum jeram bagi mereka yang ingin menelusuri sungai Nongkojajar.

Atraksi wisata yang terus berkembang ini memberi keuntungan bagi usaha setempat lainnya seperti kedai kopi, restoran, toko kerajinan tangan, pertokoan dan tempat penginapan. "Ada 3.000 sampai 3.500 pengunjung yang terdaftar di pusat informasi selama periode 2010-2014. Kini kota ini lebih sibuk karena kita terus menggali potensi wisatanya," tambah Rudi.

Dengan meningkatnya jumlah pengunjung, tempat penginapan menjadi ladang usaha yang berkembang pesat. Kini ada sekitar 25 rumah tangga yang menyediakan kamar bagi para pengunjung. Bambang Soedjono, salah satu pemilik penginapan, mengakui bahwa kelima kamar miliknya selalu penuh, terutama saat akhir

pekan. "Sekarang saya ingin membangun tiga kamar lagi," katanya.

Bambang merupakan salah satu anggota masyarakat yang mengikuti berbagai kegiatan pelatihan keterampilan ILO tentang pariwisata, terutama rumah inap, yang diadakan melalui proyek Kesempatan Kerja bagi Kaum Muda (JOY) empat tahun lalu. Ia mengakui bahwa sebelum belajar tentang penginapan, masyarakat setempat tidak pernah terpikir untuk mengubah rumah mereka menjadi rumah inap guna menambah penghasilan.

Sejalan dengan misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menjadikan Nongkojajar sebagai lokasi "Agrowisata Pendidikan", fokus pariwisata adalah memberdayakan petani setempat agar memanfaatkan lahan pertanian mereka sebagai lokasi pendidikan dan atraksi wisata. Di samping itu, semakin banyak sekolah di Jawa Timur yang mengadakan kunjungan belajar ke kota ini.

"Sebanyak 65 pelajar dari SMA 2 Surabaya baru-baru ini mengadakan kunjungan dan tinggal di sini selama tiga hari untuk belajar tentang sistem biogas, pengolahan susu dan kegiatan pertanian," jelas Ida Irawati, Ketua Forum Pengembangan Ekonomi Lokal yang mengorganisir kegiatan seperti ini. ILO memprakarsai pendirian Forum ini pada 2009 melalui serangkaian lokakarya untuk memilih Nongkojajar sebagai lokasi intervensi pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Pasuruan.

Pusat informasi Nongkojajar berhasil melibatkan partisipasi petani setempat untuk melakukan agrowisata dan pemetikan buah bagi para pengunjung. Mereka dapat menikmati agrowisata sambil memetik sendiri berbagai jenis buah dengan biaya terjangkau sebesar Rp. 25.000 per orang," ujar Rudi. Agrowisata juga merupakan bagian dari intervensi ILO untuk membangun eko-pariwisata berbasis masyarakat di daerah ini.

Nongkojajar juga berupaya mengembangkan energi alternatif dan lingkungan hidup. Pada 2010, ILO memprakarsai kerjasama antara SNV Biogas Project of Netherlands dengan koperasi Setia Kawan yang merupakan koperasi produk susu terbesar di Nongkojajar. Setia Kawan memiliki lebih dari 16.000 petani susu yang membangun program biogas melalui pelatihan teknis tentang pembangunan biogas dan bantuan keuangan.



Hingga saat ini, kerja sama antara SNV dengan koperasi Setia Kawan masih berlangsung. Hasilnya, pada 2012, koperasi Setia Kawan memperoleh penghargaan bergengsi Kalpataru dari mantan Presiden Bambang Susilo Yudhoyono. Selain itu, lebih dari 1.300 kubah biogas telah dibangun, di mana 960 di antaranya didanai oleh koperasi sementara sisanya dibangun para petani.

Peter van Rooij, Direktur ILO di Indonesia, menyambut baik kemajuan yang dicapai Nongkojajar, bahkan setelah bantuan teknis ILO melalui proyek JOY berakhir pada 2010. "Ini adalah kunci dari semua bantuan dan inisiatif ILO: kepemilikan dan keberlanjutan. Saya sangat menghargai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dan warga Nongkojajar untuk terus menggali dan mengembangkan potensi wisata dan pertaniannya."

Proyek JOY ILO bertujuan untuk membantu mengurangi kemiskinan dan menciptakan peluang memperoleh penghasilan, terutama bagi kalangan muda di Indonesia, melalui kebijakan nasional dan inisiatif lokal yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang membuka lapangan kerja. Proyek yang didanai Kerajaan Belanda ini berlangsung selama tiga tahun dari tahun 2007 hingga 2010, di mana Malang dan Kabupaten Pasuruan di Jawa Timur dipilih sebagai daerah sasaran. ❀

Mempromosikan Pekerjaan bagi Kaum Muda di Indonesia

“Jejaring Lapangan Kerja bagi Kaum Muda Indonesia (IYEN) memainkan peran penting sebagai media online bagi semua pemangku kepentingan untuk saling berbagi pengetahuan dan melakukan koordinasi mengenai proyek dan kebijakan yang ada. Juga akan tersedia bagian khusus kaum muda yang dilengkapi dengan informasi pekerjaan, program pelatihan, saran mengenai penyusunan riwayat hidup dan wawancara guna membantu mereka mempersiapkan diri dalam dunia kerja”

Rahma Iryanti

Deputi Menteri Negara Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM - Bappenas

Kurangnya kesiapan lulusan muda Indonesia dengan keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar dan ketidakcocokan keterampilan merupakan salah satu tema kunci yang dibahas dalam lokakarya satu hari bertema “Kebijakan dan Program Ketenagakerjaan Muda di Indonesia: Langkah ke Depan”, yang diselenggarakan ILO pada 25 September di Jakarta. Tema-tema ini sejalan dengan tingginya tingkat pengangguran muda di negeri ini dan di seluruh dunia. Karenanya, menjadi penting bagi kaum muda memperoleh kesempatan kerja dan menghidupi diri mereka.

Lokakarya ini didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Wakil Presiden dan didukung Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia.

Tujuan utama lokakarya ini adalah meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara para pemangku kepentingan, sebagai hal penting yang dibahas disepanjang lokakarya ini untuk menyelesaikan semua persoalan terkait kaum muda di negeri ini. Lokakarya ini juga bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan pandangan, serta meningkatkan kesadaran tentang tantangan yang dihadapi kaum muda.

Selama diskusi, semua peserta lokakarya mengakui bahwa balai-balai pelatihan dan sekolah-sekolah kejuruan belum mampu mengatasi masalah ketidakcocokan keterampilan dan diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan. Sebagian peserta bahkan menyatakan bahwa hal ini terjadi di sektor pertanian—di mana orang muda kurang tertarik melakukan pekerjaan pertanian dan bahkan tidak memiliki keterampilan dan pendidikan pertanian.

Tema utama lain yang dibahas adalah sistem pemagangan di Indonesia. Diakui bahwa pemagangan dapat sulit dikelola, dengan pekerja dan siswa sama-sama mengambil kesempatan dan, dalam sejumlah kasus, mereka berisiko dieksploitasi. Kendati demikian, disepakati bahwa sistem yang dirancang dengan baik yang melibatkan kepercayaan, kontrak yang baik, serta partisipasi semua pemangku kepentingan dapat menjadi salah satu cara paling efektif untuk melatih kaum muda.

“ILO meyakini IYEN dapat membantu mencapai target tersebut, dan kami berharap dapat bekerja sama dengan Bappenas dan semua pihak terkait agar dapat membuat IYEN menjadi sarana yang efektif,” kata Gillian Dowie, Staf ILO untuk Ketenagakerjaan Muda. ❀

Juliani: “Melangkah maju adalah prinsip hidup saya”

Bulan September 2014 merupakan bulan bersejarah yang tak mungkin dilupakan Juliiani, 31 tahun, seorang pekerja rumahan yang berasal dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Karena pada bulan tersebut, untuk pertama kalinya, ia dan sejumlah rekan pekerja rumahan memiliki keberanian untuk meminta kenaikan upah. Di samping itu, mereka mulai bersama-sama meningkatkan kondisi kerja mereka.

Juliani kini seorang perempuan yang berbeda. Tiga bulan lalu, ia sama sekali tidak mengetahui apa yang ia lakukan selama lebih dari delapan tahun dari rumahnya merupakan sebuah pekerjaan yang disebut pekerjaan rumahan. Istilah pekerja rumahan mengacu pada pekerja industri yang melakukan pekerjaan berupah dari rumah mereka, untuk perusahaan/bisnis atau perantara, biasanya secara borongan. Mengingat pekerjaan rumahan dilakukan di rumah, dan biasanya terisolir dari pekerja lain dan masyarakat setempat, pekerjaan rumahan cenderung kasat mata kendati mereka sebenarnya memberi kontribusi besar bagi perekonomian.

Juliani menjahit tempat duduk bayi dari rumah untuk sebuah perusahaan di lingkungan rumahnya, dan memperoleh upah Rp. 7.000 per lusin. Perusahaan ini menyediakan bahan-bahan yang diperlukan (kain, busa dan kain pinggiran), sementara Juliiani menyediakan mesin jahit dan perlengkapannya sendiri seperti jarum, benang dan gunting.

Rata-rata, ia mampu menjahit maksimal tujuh lusin per hari, dan memperoleh upah Rp. 400.000 sampai Rp. 1,5 juta per bulan tergantung pesanan. Upah ini tergolong lumayan untuk menambah penghasilan keluarga bila digabung dengan penghasilan sang suami. Suaminya, Sudiono, bekerja sebagai buruh bangunan harian dengan upah Rp. 600.000 hingga Rp. 2 juta per bulan.

“Sebelumnya, saya tidak pernah berani berbicara dengan majikan tentang masalah saya. Tapi sekarang, saya punya pengetahuan dan keberanian, ini berkat pelatihan yang saya peroleh dari Bitra,” katanya.

“*Pada awalnya saya bingung dan takut kehilangan pekerjaan, bahkan saya pernah berpikir untuk meninggalkan organisasi. Tapi para pendamping membujuk saya untuk tetap tinggal dan terus mengembangkan diri*”

Organisasi masyarakat madani Bitra merupakan salah satu mitra pelaksana proyek ILO mengenai Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU) yang beroperasi di kecamatan Deli Serdang. Didanai Pemerintah Australia, Proyek ini mempromosikan kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan miskin di Indonesia, dengan fokus utama pada pekerja rumahan perempuan.

Aya Matsuura, Kepala Penasihat Teknis Proyek ILO-MAMPU, mengatakan bahwa pekerja rumahan yang sebagian besar perempuan sangat rentan karena mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai dan bekerja dalam kondisi terisolir dengan posisi tawar yang lemah. Mereka bekerja secara informal tanpa kontrak tertulis, dan biasanya menerima upah lebih kecil dari upah minimum, dengan jam kerja yang lama, dan tidak memiliki jaminan pekerjaan.

“Mereka menggunakan alat dan materi tertentu yang mungkin berbahaya tidak saja terhadap diri mereka tapi juga anggota keluarga, termasuk anak-anak, sehingga mereka terekspos pada berbagai risiko keselamatan dan kesehatan,” ia menambahkan.

Setelah bergabung dengan organisasi ini, Juliani aktif berpartisipasi dalam pelatihan-pelatihan yang diadakan Bitra. Ia antara lain belajar tentang hak-haknya sebagai pekerja, peraturan ketenagakerjaan, kesetaraan gender, perlindungan sosial dan cara berkomunikasi dan bernegosiasi dengan baik.

Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang hak-hak mereka sebagai pekerja, Juliani dan sejumlah rekan kerjanya memberanikan diri menemui majikan mereka dan meminta kenaikan upah. “Para pengumpul sebagai perwakilan perusahaan merasa kaget dengan permintaan kami. Mereka menolak mendiskusikannya,” kata Juliani.

Namun Juliani pantang menyerah. Ia secara pribadi berbicara kembali dengan para pengumpul dengan menjelaskan bahwa permintaan kenaikan upah ini untuk menutup kenaikan biaya transportasi dan barang. “Dengan menerapkan apa yang telah saya pelajari selama pelatihan, saya meminta mereka untuk mempertimbangkan permintaan kami karena kami belum pernah meminta kenaikan sebelumnya,” tambahnya.

Pada akhirnya, keberaniannya membuahkan hasil. Ia diberitahu bahwa pihak perusahaan setuju untuk menaikkan upahnya menjadi Rp. 8.000 per lusin, tidak saja untuk dirinya tapi semua anggota kelompoknya. “Kami semua gembira dengan berita baik ini.”

Juliani kini telah berubah. Ia terinspirasi untuk menjadi perempuan yang kuat, cerdas dan berani. Ia juga telah menetapkan target pribadi untuk terus meningkatkan keterampilannya, memperoleh penghasilan yang lebih baik dan memperbaiki kondisi kerjanya. Ia bahkan sudah berbicara dengan suaminya tentang kesetaraan gender dan bagaimana ia menghargai kontribusi sang suami terhadap pekerjaan rumah dan kontribusi dirinya bagi perekonomian keluarga. “Melangkah maju adalah prinsip hidup saya,” tegas Juliani. 🌸

Penelitian ILO tentang Identitas Gender dan Orientasi Seksual di Dunia Kerja

ILO berkomitmen untuk menghapus segala bentuk diskriminasi di dunia kerja, termasuk diskriminasi terhadap kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan pekerjaan layak bagi semua orang. Oleh karena itu, tahun ini, ILO melalui Proyek Mempromosikan Hak, Diversitas dan Kesetaraan dalam Dunia Kerja (PRIDE) memulai penelitian untuk mengidentifikasi luas dan bentuk diskriminasi di tempat kerja yang dihadapi pekerja LGBT di semua tahap siklus pekerjaan.

Penelitian ini meneliti tantangan maupun praktik terbaik dalam memerangi diskriminasi serta mempromosikan kesetaraan dalam pekerjaan bagi kaum LGBT di Indonesia sesuai dengan empat pilar Agenda Pekerjaan Layak ILO.

Penelitian ini juga melibatkan partisipasi anggota konfederasi serikat pekerja yang telah diberikan pelatihan sebagai enumerator untuk aspek kuantitatif dari penelitian ini. Untuk finalisasi, lokakarya validasi nasional telah diadakan pada 26 Agustus untuk berbagi pengalaman dan berkonsultasi tentang hasil temuan penting bersama para konstituen tripartit ILO serta pemangku kepentingan utama lainnya, termasuk komunitas LGBT. Hasil penelitian tentang LGBT ini direncanakan akan dirilis dan diluncurkan awal tahun 2015.

Proyek PRIDE ILO bertujuan untuk mengatasi masalah diskriminasi terhadap kaum lesbian, gay, biseksual, and transgender (LGBT) dengan mengidentifikasi berbagai bentuk diskriminasi yang dialami kaum LGBT di tempat kerja, menyebarluaskan hasil temuan penelitian ini serta bekerja sama dengan para konstituen dalam mempromosikan hak, diversitas dan toleransi di dunia kerja. 🌸





© ILO - BWI

Sudarmi:

Kehidupan Dinamis Seorang Pekerja Perempuan

Hari masih pagi saat Sudarmi terbangun dari tidurnya. Meski masih merasa lelah, ia memaksakan diri untuk bangun dan bergegas ke kamar mandi untuk bersiap-siap berangkat kerja. Suaminya masih tertidur lelap saat Sudarmi dengan enggan membangunkannya.

Secara perlahan ia berbisik kepada orang yang telah menjadi pendamping hidupnya selama 18 tahun, "Sayang, bangun. Sarapan sudah siap." Suaminya pun terbangun, walau masih mengantuk. "Tolong antarkan saya ke pabrik, mau kan? Saya tidak mau terlambat," kata Sudarmi, sambil tersenyum.

Jam masih menunjukkan pukul 6:00 pagi saat Sudarmi dan suaminya mengendarai motor, meninggalkan rumah menuju lokasi pabrik di daerah Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Setibanya di pintu gerbang pabrik, Sudarmi segera turun dari motor dan berkata, "Terima kasih sayang. Doakan semuanya berjalan lancar hari ini." Suaminya tersenyum dan melambatkan tangan. Mereka pergi ke arah berlawanan.

Sudarmi, ibu satu anak, adalah pekerja yang ulet dan penuh dedikasi. Ia sudah bekerja di PT. Citra Abadi Sejati selama 15 tahun. PT. Citra Abadi Sejati merupakan perusahaan garmen skala besar yang mempekerjakan lebih dari 3.000 orang pekerja. Perusahaan ini merupakan salah satu mitra Better Work Indonesia (BWI) sejak tahun 2011.

Terus meningkatkan diri

Sudarmi, yang lahir di Lampung, saat ini bekerja sebagai Kepala Pengawas Bagian Penjahitan. Bawahannya termasuk empat orang pengawas dan ratusan operator mesin jahit di pabrik tersebut. Ia mengakui bahwa bekerja di pabrik garmen memiliki tantangan tersendiri karena merupakan industri padat karya—jauh berbeda dari perusahaan lain yang padat modal. Masalah interpersonal dan komunikasi biasanya merupakan tantangan yang sering muncul di bidang industri ini.

"Saya tidak tahu cara berkomunikasi secara efektif dengan bawahan saya, apalagi memberi inspirasi kepada mereka. Kadang-kadang saya bersikap sangat agresif dan cepat merasa marah saat menghadapi masalah di tempat kerja," keluh Sudarmi.

Ia mengakui beban kerja dan kewajiban untuk memenuhi permintaan pembeli sesuai target pesanan, ditambah tingkat kelelahan fisik atau mental yang dialami pekerja, menjadi tantangan yang dapat memicu timbulnya masalah lain.

"Saya mengawali karir sebagai operator mesin jahit. Waktu itu, saya tidak punya keterampilan menjahit yang dibutuhkan, tapi saya bekerja keras dengan penuh komitmen. Saya tahu rasanya menjadi operator karenanya saya harus bisa menjadi pengawas yang lebih baik," katanya mengingat saat masih menjadi pekerja.

Untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai kepala pengawas, Sudarmi secara sukarela mendaftarkan diri mengikuti Program Pelatihan Keterampilan Pengawas yang diadakan bekerja

sama dengan BWI dan PT. Citra Abadi Sejati-Cileungsi. "Manajemen tingkat atas, manajer, pengawas dan operator mesin jahit bukanlah mesin. Kami melaksanakan tugas yang lebih dari sekedar bekerja. Kami juga butuh berinteraksi dengan orang lain," katanya.

Setelah menyelesaikan pelatihan, ia berkumpul dengan semua pengawas dan membahas metode peningkatan yang dapat diterapkan agar operator mesin jahit dapat meningkatkan kinerja dan produktivitasnya.

"Biasanya saya kurang peka terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Setiap operator mesin jahit punya keterampilan yang berbeda. Ketidakmampuan mereka mungkin dikarenakan kurangnya keterampilan jahit. Sekarang saya sudah mengadakan berbagai diskusi dengan rekan-rekan pengawas, dan kami putuskan untuk mengadakan pelatihan keterampilan menjahit agar dapat meningkatkan keterampilan operator," katanya, menjelaskan tindakan yang akan dilakukan divisinya.

Usulannya ini mendapat tanggapan positif dari operator yang bekerja di bawah pengawasannya. Ia dan rekan kerjanya percaya bahwa peningkatan keterampilan ini akan mempertebal rasa percaya dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Masalah produktivitas akan dapat diatasi secara bertahap.

Aktif dalam Komite K3

Di samping produktivitas, ia juga memberi perhatian serius terhadap masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Minatnya ini membuat ia terpilih sebagai anggota Komite K3.

"Dulu, saya tidak terlalu menganggap penting masalah K3. Apa yang saya tahu adalah bekerja untuk mencapai target. Tapi sekarang saya tahu betapa pentingnya persoalan ini; pelatihan tersebut membuka mata saya," tegas Sudarmi.

Ia tidak hanya menerapkan pengetahuannya tentang K3 di tempat kerja, tapi juga di rumah. "Bila terjadi kebakaran di rumah, misalnya, saya tahu tindakan apa yang perlu diambil untuk memadamkan api dan tindakan apa yang perlu diambil saat menghadapi situasi darurat," katanya.

“ Bila ada yang tidak patuh, Komite Manajemen K3 tidak segan-segan memberi peringatan kepada pelaku dan menindaklanjutinya dengan memberi orientasi tentang masalah K3. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran pekerja tentang pentingnya K3 di tempat kerja ”

Sudarmi dan anggota Komite Manajemen K3 mengadakan rapat secara rutin untuk mempromosikan persoalan-persoalan yang terkait dengan K3 di tempat kerja. Ia juga mengakui bahwa meski Komite telah melakukan berbagai upaya secara intensif, masih ada pekerja yang tidak mematuhi peraturan tentang pemakaian alat pelindung diri.

Kehidupan setelah pensiun

"Motivasi utama saya untuk terus bekerja adalah anak saya, yang sekarang bersekolah di Cianjur. Harapan saya ia kelak memiliki masa depan yang lebih baik dari saya," tegasnya. Selain anak tunggalnya, ia juga memikirkan masa depannya setelah pensiun nanti. Ia sadar bahwa hidup adalah lebih dari sekedar bekerja.

"Dari tahun ke tahun, saya menyadari bahwa saya akan beranjak tua. Saya tidak dapat membayangkan jika saya berumur 50 tahun dan masih bekerja di industri ini. Saya tahu stamina saya akan menurun dan saya mungkin tidak mampu lagi memasukkan benang ke dalam lubang jarum," kata Sudarmi sembari terbawa.

Oleh karena itu, ia berharap saat usianya beranjak 50 tahun, ia sudah punya profesi lain sebagai koki, tukang roti atau pengusaha katering. "Saya ingin menjadi pengusaha kuliner. Itu impian saya. Saya sudah mulai mengikuti pelatihan memasak dan mengelola usaha kuliner, dan saya sedang mempersiapkan diri," kata Sudarmi kepada tim BWI, mengakhiri ceritanya. ✨

Redaksi

Pemimpin Redaksi: Peter van Rooij

Wakil Pemimpin Redaksi: Miyako Miyamoto

Eksekutif Editor: Gita Lingga

Koordinator Editorial: Gita Lingga

Sirkulasi: Budi Setiawati

Kontributor: Albert Y. Bonasahat, Arum Ratnawati, Enardson Layang, Fasrul, Gillian Dowie, Gita Lingga, Irfan Affandi, Irham Saifuddin, Josephine Imelda, Lusiani Julia, Muce Mochtar, Nurvitria M. Křištofiková, Novita Hendrina/Aya Matsuura, Pertiwi Triwidiahening, Sarah Ayu, Yunirwan Gah and Yohanis Pakereang

Desain & Produksi: Balegraph

Warta ILO Jakarta

Menara Thamrin Building, Lantai 22

Jl. M. H. Thamrin Kav 3, Jakarta 10250, Indonesia

Telp. (62-21) 391-3112, Faks. (62-21) 310-0766

Email: jakarta@ilo.org, Website: www.ilo.org/jakarta

Warta ILO Jakarta merupakan terbitan ILO dalam dua bahasa yang bertujuan memberitakan kegiatan-kegiatan pokok ILO Jakarta di Indonesia. Warta ini akan dipublikasikan tiga kali alam setahun serta dapat diakses secara online. Opini-opini yang tercantum di dalam publikasi ini tidak mencerminkan pandangan dari ILO.

Peringatan Hari Menentang Pekerja Anak se-Dunia 2014: “Kami tidak mau bekerja, kami ingin bersekolah”

“Saya biasa hidup dan bekerja di jalanan siang dan malam. Kehidupan saya di jalanan sangat keras dan saya berhenti sekolah. Tapi, kehidupan saya berubah setelah bergabung dengan rumah belajar Yayasan Sekar. Sekarang, saya ingin kembali sekolah, meraih masa depan dan membahagiakan ibu,” kata Romi, 15 tahun, mantan anak jalanan, saat berbagi cerita dalam dialog yang diadakan dalam memperingati Hari Menentang Pekerja Anak se-Dunia pada 24 Juni.

Mengusung tema “Memperluas Perlindungan Sosial untuk Memerangi Pekerja Anak”, acara ini diselenggarakan ILO bersama dengan Yayasan Sekar, sebuah yayasan yang mengelola rumah belajar di Penjaringan, Jakarta, untuk meningkatkan kesadaran tentang program-program perlindungan sosial yang ada serta menyerukan pentingnya perluasan dan peningkatan upaya menanggulangi dan memerangi pekerja anak.

Romi merupakan salah satu dari 210 mantan pekerja anak yang berpartisipasi dalam bantuan pendidikan selama satu bulan yang diselenggarakan di tujuh rumah belajar di seluruh wilayah Jakarta dan sekitarnya. Acara ini menandai inagurasi anak-anak di rumah belajar tersebut di mana mereka dibimbing, diberi motivasi dan diberikan kecakapan hidup.

Rumah belajar anak ini dikembangkan melalui program pemerintah Penarikan Pekerja Anak dalam rangka Program Keluarga Harapan (PPA-PKH), yang merupakan salah satu program perlindungan sosial yang ada. Rumah belajar ini memberikan bantuan pendidikan bagi para pekerja anak sebelum mengarahkan mereka kepada program pendidikan yang ada (formal dan non-formal).

▼ Mantan pekerja anak belajar kecakapan hidup di rumah belajar anak

“Berdasarkan perkiraan terbaru ILO global, jumlah pekerja anak turun dari 215 juta menjadi 168 juta antara tahun 2008 hingga 2012. Jumlah pekerja anak yang melakukan pekerjaan berbahaya turun dari 115 juta menjadi 85 juta. Sejak tahun 2000, jumlah pekerja anak turun sepertiga dan telah tercapai kemajuan pesat”

Peter van Rooij
Direktur ILO di Indonesia

“Melalui program PPA-PKH ini, Pemerintah Indonesia berencana menarik sekitar 16.000 pekerja anak pada 2014 dari sejumlah kabupaten dan kecamatan di seluruh Indonesia. Program PPA-PKH diselenggarakan sejak tahun 2008 sebagai bagian upaya Indonesia menghapuskan pekerja anak,” ujar Muchtar Lutfie, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja.

Selain dialog interaktif, anak-anak dari rumah belajar menampilkan drama musikal yang menggambarkan perjalanan mereka dari pekerja anak menjadi anak-anak dengan harapan baru untuk kembali bersekolah. Mereka menyusun sendiri naskah drama, menciptakan alat musik unik menggunakan limbah, membuat kostum serta mengatur pertunjukan dengan bantuan para pembimbing mereka.

“Saya senang melihat perbedaan yang terjadi pada anak saya sekarang. Ia lebih alim, disiplin dan rapi. Saya tidak mau ia bekerja atau berada di jalanan. Saya harap ia dapat melanjutkan sekolah dan menerapkan apa yang telah ia pelajari di rumah belajar dalam hidupnya,” kata salah seorang ibu yang menghadiri dialog dengan terharu seraya menambahkan bahwa ia merasa bangga atas apa yang telah dicapai anaknya kini.

Sementara Wardoyo, Ketua Yayasan Sekar, mengatakan bahwa ada sekitar 40 anak dari program PPA-PKH yang tengah ditangani Yayasan Sekar. “Kami berharap mereka dapat melanjutkan apa yang mereka telah pelajari dan mereka tidak kembali bekerja tapi bersekolah. Sebagian anak menyatakan keinginan mereka untuk tetap tinggal di sini karena mereka ingin kembali ke sekolah.”



Menginspirasi siswa melalui Modul Pengajaran Pra-vokasional yang Interaktif

© ILO Jakarta



Para pelajar sekolah SMP satu atap di Sukabumi menunjukkan perkembangan pesat dalam keterampilan pribadi, sosial dan kecakapan hidup setelah diajarkan menggunakan modul pengajaran pra-vokasional yang baru, demikian penjabaran hasil terbaru *post-test* mengenai program intervensi pra-vokasional yang diselenggarakan di Kabupaten Sukabumi saat Lokakarya Berbagi Pengetahuan pada April.

Lokakarya ini diselenggarakan ILO melalui Program Memerangi Pekerja Anak melalui Pendidikan, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Sukabumi dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Lokakarya ini menandai akhir dari tahap pertama Program Pekerja Anak ILO di Kabupaten Sukabumi dan daerah sasaran lain (Jakarta dan sekitarnya serta Makassar). Didanai Kementerian Luar Negeri Belanda, Proyek ini bertujuan memperkuat keterkaitan di tingkat kebijakan antara permasalahan pekerja anak dan pendidikan, yang mengarah pada tindakan yang dapat memperluas kesempatan bagi pekerja anak atau anak yang rentan terhadap pendidikan. Tahap selanjutnya dari program ini akan difokuskan pada pelatihan keterampilan dan mata pencaharian.

Penelitian *post-test* ini merupakan tindak lanjut dari penelitian *pre-test*, yang bertujuan mengukur perubahan dalam keterampilan pribadi, sosial dan keterampilan hidup dari 371 pelajar yang berasal dari sembilan SMP satu atap dan tiga program pra-vokasional setelah mengikuti program intervensi menggunakan modul dan struktur pengajaran pra-vokasional yang baru.

“Modul dan struktur pengajaran pra-vokasional yang digunakan dalam program intervensi ini bersifat lebih partisipatif dan interaktif. Para guru secara interaktif melibatkan partisipasi siswa melalui simulasi dan kegiatan pra-vokasional praktis seperti pembuatan kerajinan tangan”

Fasrul

Staf Proyek ILO untuk Pekerja Anak dan Pendidikan

◀ Siswa sekolah menengah pertama di sekolah satu atap

Penelitian *post-test* ini memperlihatkan bahwa perubahan terbesar ditemukan dalam keterampilan pribadi (perilaku dan komunikasi), diikuti kecakapan hidup (pola pikir dan sikap) dan keterampilan sosial (kerja sama tim). Penelitian ini juga memperlihatkan dampak besar terhadap peningkatan keterampilan pribadi. Hasil temuan ini juga memperlihatkan keberhasilan intervensi baru ini dalam mencegah siswa agar tidak putus sekolah dan tetap bersekolah.

Modul-modul ini dikembangkan oleh UPI dengan menggunakan dan memadukan berbagai modul, termasuk modul-modul ILO seperti SCREAM – Mendukung Hak Anak melalui Pendidikan, Seni dan Media.

Sementara, Dr. Anne Hafina, Kepala Tim Peneliti UPI, mengatakan bahwa para siswa juga ditemukan menjadi lebih percaya diri, termotivasi dan komunikatif. “Apa yang mereka pelajari di sekolah juga mencerminkan kepribadian mereka. Mereka lebih menghormati teman dan lebih menyadari pentingnya pendidikan bagi kehidupan mereka di masa mendatang. Sebagian besar siswa bahkan menyatakan menolak pernikahan dini,” kata Anne.

Lokakarya ini diakhiri dengan penyerahan hasil penelitian kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai rekomendasi dalam menyusun rencana pendidikan di masa mendatang di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Di samping itu, para peserta dari kabupaten lain, seperti Garut dan Tasikmalaya, yang memiliki kondisi serupa seperti Sukabumi tertarik untuk mereplikasi modul pengajaran pra-vokasional baru ini agar dapat mencegah putus sekolah dan mendorong lebih banyak siswa tetap bersekolah.

Penelitian *pre- and post-tests* ini diadakan UPI pada Desember 2013 dan awal April 2014. *Post-test* diadakan satu bulan setelah intervensi dilakukan. ❁

PROMOTE: Mempromosikan Pekerjaan Layak untuk Pekerja Rumah Tangga untuk Hapuskan Pekerja Rumah Tangga Anak

© ILO Jakarta



ILO kini tengah melaksanakan Proyek PROMOTE yang bertujuan untuk mempromosikan pekerjaan layak bagi pekerja rumah tangga (PRT) serta menghentikan pekerja rumah tangga anak (PRTA) di Indonesia. Proyek ini sejalan dengan adopsi Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerjaan Layak untuk Pekerja Rumah Tangga tahun 2011.

Konvensi ini memperluas perlindungan utama bagi jutaan pekerja, di mana sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, di mana hak-hak mendasarnya belum terjamin. Konvensi ini merupakan standar global pertama bagi 52,6 juta pekerja rumah tangga (PRT) di seluruh dunia.

“PRT, seperti halnya pekerja lain, berhak atas kondisi kerja dan kehidupan yang layak. Konvensi ini menjelaskan bahwa anak-anak di atas usia kerja minimum harus diberi perlindungan khusus saat melaksanakan pekerjaan rumah,” kata Arum Ratnawati, Kepala Penasehat Teknis untuk Proyek PROMOTE.

Sebagai negara dengan penghasilan menengah, dan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi serta meningkatnya jumlah penduduk kelas menengah, permintaan akan PRT di Indonesia diperkirakan semakin meningkat. Analisa data Survei Tenaga Kerja Nasional tahun 2012 menunjukkan bahwa ada sekitar 2,6 juta PRT usia 15 tahun ke atas (90 persen di antaranya adalah perempuan) di Indonesia. Menurut analisa ini, setidaknya sekitar 110.000 di antaranya adalah mereka yang termasuk dalam kelompok usia 15 hingga 17 tahun. Namun sayangnya, jumlah anak-anak usia 15 tahun ke bawah yang bekerja sebagai PRT, tidak dapat diperkirakan karena data tidak tersedia.

Hak-hak PRT sebagai pekerja di Indonesia kurang dilindungi oleh UU Ketenagakerjaan tahun 2003 karena jenis pekerjaan mereka yang sebagian besar informal tidak dilindungi UU ini. PRT umumnya tidak dianggap sebagai pekerja, tapi sebagai “pembantu,” dan karena itu, majikan tidak mengakui kewajiban yang muncul dari hubungan kerja mereka. Majikan biasanya menganggap pekerjaan rumahan, terutama bagi PRT yang menginap, sebagai pekerjaan 24 jam sehari, sehingga tidak mengindahkan peraturan tentang jam kerja dan hari libur.

“Proyek PROMOTE bertujuan untuk mengurangi jumlah PRTA secara signifikan dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan para mitra agar dapat secara efektif mempromosikan pekerjaan layak untuk PRT. Proyek ini berupaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian mereka agar dapat mengurangi jumlah PRTA serta mempromosikan pekerjaan layak untuk PRT, dengan fokus utama pada Indonesia sebagai negara terpadat keempat di dunia dan tempat tinggal bagi jutaan PRT,” tambah Arum.

Proyek PROMOTE juga bekerjasama dalam kemitraan dengan tiga koalisi/jaringan strategis, yaitu JALA PRT, KAPPRT-BM dan JARAK, yang diharapkan mampu mempengaruhi wacana publik dan tindakan masyarakat terkait upaya menghapus PRTA serta mempromosikan pekerjaan layak untuk PRT.

Di samping itu, PROMOTE juga akan berinvestasi di bidang pengembangan kapasitas dua organisasi regional yang berpengaruh, yaitu IDWF dan ITUC-APRO, di mana IDWF akan mempromosikan peningkatan kapasitas dan berbagi pengetahuan; sementara ITUC-APRO akan memobilisir serikat pekerja agar dapat memajukan pekerjaan layak bagi PRT serta mencegah PRTA. ❁

Memperkuat Partisipasi Sektor Swasta dalam Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja

Perwakilan organisasi masyarakat berkumpul di Jakarta, dari tanggal 29 sampai 31 Agustus, untuk memperkuat kapasitas organisasi masyarakat dalam mengatasi tantangan untuk menjangkau pekerja laki-laki beresiko tinggi atau *high-risk men* (HRM) di tempat kerja. Lokakarya 2 hari bertema "Metoda Program Partisipasi Sektor Swasta untuk Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja" ini diselenggarakan ILO melalui program Konseling dan Tes HIV di Tempat Kerja (VCT@Work)".

Diluncurkan tahun 2013, inisiatif VCT@Work di Indonesia ini membantu 350.000 pekerja untuk memperoleh layanan VCT pada akhir tahun 2015, dari yang ditargetkan sebanyak 10.000 orang pekerja di akhir tahun 2013. Prioritasnya adalah untuk sektor industri dengan tingkat kerentanan HIV yang sudah terbukti, termasuk sektor transportasi, perkebunan, pertambangan dan konstruksi.



© ILO Jakarta

...inisiatif VCT@WORK di Indonesia ini telah menjangkau lebih dari 29.000 orang pekerja dengan VCT...

▲ Prakarsa VCT@Work di tempat kerja

Hingga saat ini, melalui kerjasama erat antara ILO dengan berbagai organisasi masyarakat, inisiatif VCT@WORK di Indonesia ini telah menjangkau lebih dari 29.000 orang pekerja dengan VCT dan telah membawa mereka yang teruji positif untuk memperoleh perawatan. Mitra utamanya antara lain adalah Yayasan Kusuma Buana, Lembaga Advokasi HIV/AIDS Sulawesi Tenggara, Kantong Informasi Pemberdayaan Kesehatan Adiksi dan Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).

Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai target inisiatif, lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petugas lapangan serta anggota dari organisasi masyarakat terkait di tingkat provinsi dan kota/kabupaten untuk secara aktif melibatkan sektor swasta dalam program-program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

Partisipasi sektor swasta untuk mengatasi epidemik HIV dapat meningkatkan secara signifikan efektivitas advokasi dan kebijakan perlindungan hak-hak pekerja yang beresiko terjangkit atau sudah positif mengidap HIV.

Selama lokakarya ini, Dr. Sudi Astono, MS, Kepala Seksi Pengawasan Norma Pelayanan Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mengingatkan peserta tentang prinsip utama Keputusan Menteri No. 68/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat kerja, seraya menambahkan bahwa kebijakan ini masih merupakan media

yang penting untuk memobilisir sektor swasta. Sementara itu, Dr. Adi Sasongko, Direktur Layanan Kesehatan, Yayasan Kusuma Buana, menegaskan bahwa strategi untuk melibatkan partisipasi sektor swasta adalah salah satu intervensi paling strategis untuk meningkatkan kesadaran tentang perilaku seks, pemakaian kondom, dan resiko HIV/AIDS.

Lokakarya ini diakhiri dengan penyusunan rencana aksi tindak lanjut untuk memperkuat partisipasi sektor swasta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Peserta juga menyusun peta perusahaan prospektif di daerah mereka masing-masing.

Lokakarya ini dihadiri petugas lapangan dari PKBI, pegawai tingkat provinsi dan kota/kabupaten dari Strategic Use of ARV (SUFAR) di seluruh Indonesia, termasuk dari Sumatera Selatan, Kep. Riau, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, dan Sulawesi Selatan. Lokakarya ini juga dihadiri oleh Organisasi Angkutan Darat (Organda) yang menyediakan layanan VCT secara rutin untuk pekerja mereka.

Tingkat pertumbuhan epidemik HIV di Indonesia adalah salah satu yang tercepat di Asia. Sekitar 70,4 persen orang yang hidup dengan HIV (ODHA) di Indonesia adalah dalam usia produktif mereka, yaitu antara 25 sampai 49 tahun. Tempat kerja adalah tempat dimana mereka yang terinfeksi epidemik ini meluangkan sebagian besar waktu mereka. ❁

Laporan BWI Ungkap Tingginya Tingkat Ketidapatuhan terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Pabrik Garmen di Indonesia

© ILO - BWI



Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) merupakan aspek terpenting yang berperan dalam produktivitas yang lebih baik di pabrik dan demi alasan moral, hukum serta keuangan. Semua perusahaan berkewajiban memastikan karyawannya dan orang lain yang mungkin terkena dampak dalam kondisi aman setiap saat.

Data dari Pemerintah Indonesia, Kementerian Dalam Negeri memperlihatkan kasus kebakaran berkontribusi sebesar 15 persen dari keseluruhan kejadian bencana. Pada 2012, departemen pemadam kebakaran nasional mencatat 16,500 insiden kebakaran yang terjadi di 498 kecamatan dan kelurahan, dengan insiden tertinggi di Jakarta sebanyak 890 kasus, diikuti Surabaya dengan 187 kasus dan Tangerang dengan 167 kasus. Kepala Pemadam Kebakaran Nasional melaporkan 60 persen dari insiden ini diakibatkan hubungan arus pendek. Di tahun itu saja, kecelakaan telah menghancurkan 18 fasilitas, dengan lebih dari 100 orang cedera serius dan kerugian materi lebih dari 22 milyar rupiah.

Laporan Sintesis BWI ke-4 diterbitkan di bulan Juli mengindikasikan masih tingginya ketidakpatuhan K3 di banyak pabrik. Situasi ini diakibatkan lemahnya sistem manajemen K3 akibat kurangnya komitmen dari pihak manajemen dan kurang berfungsinya K3 komitmen. Karena alasan itulah, risiko kebakaran menjadi salah satu isu K3 terbesar di pabrik-pabrik garmen terutama mitra pabrik

....kebakaran berkontribusi sebesar 15 persen dari keseluruhan kejadian bencana....

◀ Para pekerja perempuan di pabrik garmen

Better Work Indonesia (BWI). Selanjutnya, BWI menemukan banyak pabrik garmen yang tidak memiliki unit penanggulangan/ pencegahan kebakaran yang memadai kendati sudah diwajibkan oleh peraturan perundangan Indonesia.

Melihat situasi saat ini, BWI bekerja sama dengan pembeli internasional, ASICS, menyelenggarakan pelatihan satu hari mengenai Keselamatan

Listrik dan Kebakaran yang disasarkan kepada manajemen tingkat tinggi dari rantai pemasok ASICS di Asia Pasifik. Pelatihan diselenggarakan pada 15 October di Jakarta. Tujuan dari pelatihan ini adalah melengkapi para peserta dengan pengetahuan dan untuk merumuskan strategi dan perangkat penting guna meningkatkan kepatuhan keselamatan di perusahaan. Pelatihan mencakup tema-tema berikut: a) kebijakan dan standar yang ada mengenai kepatuhan keselamatan listrik dan kebakaran; b) penerapan dan tantangan; dan c) strategi dan rencana aksi.

Diharapkan melalui keterlibatan aktif BWI dan pembeli internasional, manajemen pabrik akan lebih siap merumuskan keputusan strategis yang akan meningkatkan tingkat keselamatan di perusahaan dan meningkatkan kondisi kerja di pabrik-pabrik garmen di Indonesia. 🌸

Serikat Pekerja Tekankan Pencegahan Kecelakaan dan Penyakit akibat Kerja

Perwakilan serikat pekerja dari 14 negara di Asia dan Pasifik sepakat bahwa membangun budaya pencegahan keselamatan dan kesehatan perlu dijadikan prioritas. Kesepakatan ini dicapai dalam Simposium Regional tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang berlangsung selama tiga hari di Jakarta dari 1- 3 Oktober.

Perwakilan serikat pekerja juga menetapkan serangkaian rekomendasi untuk meningkatkan kerja sama antar serikat di tingkat regional terkait masalah K3. Mereka mendesak adanya tindakan dari semua serikat pekerja dalam mempromosikan perubahan dari keselamatan dan kesehatan berbasis perilaku menjadi tindakan pencegahan, ratifikasi dan pelaksanaan standar-standar penting ILO terkait K3 (Konvensi ILO No. 155, Protokol terkait tahun 2002 dan Konvensi ILO No. 187), pelatihan dan pendidikan bagi pemimpin serikat, peningkatan kesadaran di kalangan manajemen dan pekerja tentang bahaya serta risiko kerja serta tindakan pencegahan.

Rekomendasi lain mencakup: kampanye tentang hak atas pekerjaan layak; mempromosikan partisipasi pekerja dan perwakilan mereka dalam menyusun, melaksanakan dan

memantau kegiatan K3 di semua tingkatan dari tingkat perusahaan hingga nasional; mempromosikan rehabilitasi dan hak untuk kembali bekerja bagi pekerja yang cedera; memperkuat kerja sama dengan pihak otoritas dan inspektorat tenaga kerja guna memastikan peningkatan kepatuhan perusahaan serta melakukan lobi untuk memastikan inspektorat yang lebih kuat dan efektif.

Simposium ini diselenggarakan oleh Biro Kegiatan Pekerja (ACTRAV) ILO bersama dengan Kantor ILO Jakarta dan Dinas Tenaga Kerja, Divisi Pengawasan Tenaga Kerja dan K3, serta didukung Program South-South Cooperation ACTRAV/ All-China Federation of Trade Union (ACFTU). Simposium ini bertujuan memperkuat peran serikat pekerja dalam menegaskan pentingnya masalah K3 serta memperkenalkan instrumen K3 ILO agar serikat pekerja dapat mempengaruhi penyusunan kebijakan K3.

Simposium ini dihadiri oleh 35 pimpinan serikat pekerja dari Australia, Kamboja, Fiji, India, Indonesia, Selandia Baru, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Filipina, Thailand, Timor-Leste dan Vietnam. ❁

© ILO Jakarta



Konferensi Pertama tentang Hubungan Industri di Indonesia

The Indonesian Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melalui Pusat Pelatihan Apindo menyelenggarakan Konferensi Hubungan Industrial Indonesia pertama di Yogyakarta dari 14 hingga 17 Oktober. Acara yang dihadiri 300 peserta ini, yang sebagian besar berasal dari sektor swasta, bertujuan membahas perkembangan hubungan industrial di Indonesia, terutama terkait dengan persoalan perlindungan sosial dan upah.

Konferensi ini dibagi menjadi beberapa sesi yang membahas tentang jaminan sosial, gambaran tentang sumber daya manusia, kondisi hubungan industrial, upah dan produktivitas, serta hubungan kerja. Sejumlah narasumber dari kalangan pemerintah, organisasi pengusaha, organisasi pekerja, perusahaan swasta dan ILO berbagi pandangan-pandangan mereka.

Peter van Rooij, Direktur ILO untuk Indonesia, dalam kata sambutannya mengenai permasalahan ketenagakerjaan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, menegaskan bahwa keberhasilan integrasi regional ASEAN sangat tergantung pada bagaimana ia dapat mempengaruhi pasar kerja dan meningkatkan kualitas kehidupan laki-laki dan perempuan di kawasan ini. Sementara itu, John Ritchotte, Spesialis Hubungan Industrial ILO, memaparkan situasi komparatif dari hubungan industrial di negara-negara ASEAN.

Di samping itu, ILO juga menyediakan informasi dan publikasi terkait ketenagakerjaan dan perburuhan melalui gerai informasinya. ❁

Meningkatkan Penetapan Upah Minimum di Jawa Barat

© ILO Jakarta/A. Mirza

Selama 15 tahun terakhir, Indonesia mengalami perubahan besar di bidang sosial dan politik sehingga sistem pekerjaan layaknya terbentuk melalui proses transisi secara demokratis. Transisi demokratis ini membuka era baru hubungan industrial berdasarkan kebebasan berserikat dan perundingan bersama.

Meskipun demikian, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam hal hubungan industrial dan penetapan upah. Salah satu masalah utama yang terkait dengan penetapan upah di Indonesia adalah besarnya ketergantungan terhadap mekanisme penetapan upah minimum secara desentralisir. Sistem penetapan upah minimum di Indonesia sangat terfragmentasi oleh demarkasi secara geografis dan sektoral, sementara koordinasi di tingkat pusat masih minim.

“Indonesia memiliki sistem tripartit yang baik tapi juga sangat rumit. Pelaksanaan sistem ini memiliki tantangan, termasuk dalam hal penetapan upah minimum. Untuk itu, para aktor tripartit perlu melihat persoalan khusus mana yang perlu ditingkatkan agar sistem ini menjadi lebih baik”

Michiko Miyamoto
Deputi Direktur ILO di Indonesia



▲ Lini produksi di pabrik

Ada pendapat bahwa proses penetapan upah minimum yang terdesentralisir ini terlalu dipolitisir dan kurang memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti, dan ini mungkin disebabkan oleh masalah analisa dan pengumpulan data.

Salah satu provinsi yang menerima tekanan dan perhatian besar di bidang hubungan industrial adalah Jawa Barat. Sesuai hasil diskusi awal bersama para konstituen tripartit di Jawa Barat, ILO menyelenggarakan lokakarya tripartit untuk berbagi pengetahuan dan pandangan tentang langkah-langkah khusus memperbaiki sistem penetapan upah minimum, dan mencari masukan dalam melaksanakan penelitian ILO tentang penetapan upah minimum.

Lokakarya dua hari ini dihadiri sekitar 30 peserta dari kalangan pemerintah, pekerja dan pengusaha yang secara langsung terlibat dengan badan-badan penetapan upah minimum tripartit di Jawa Barat, dan dari sejumlah kabupaten terpilih di provinsi ini.

Jawa Barat merupakan provinsi yang relatif besar dan memiliki banyak industri serta sistem penetapan upah minimum yang unik dan tidak sepenuhnya mengikuti peraturan nasional.

Sejumlah kabupaten dan kotamadya, misalnya, menerapkan upah minimum mereka berdasarkan jenis usaha atau bidang industri.

“Di Jawa Barat, kami menetapkan upah minimum yang berbeda. Hingga saat ini, kami belum menerima komentar ataupun koreksi dari Kementerian Tenaga Kerja, dan ini berarti kami memiliki solusi yang kreatif untuk situasi industri yang unik di Jawa Barat,” kata Hening Widiatmoko, Kepala Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat, dalam kata sambutannya. Sejak tahun 2011, Provinsi Jawa Barat tidak pernah menetapkan upah minimum provinsi.

Perwakilan organisasi pekerja dan pengusaha di Jawa Barat berharap akan ada perbaikan dalam penetapan upah minimum. Untuk menindaklanjuti lokakarya ini, ILO akan mengadakan penelitian tentang penetapan upah minimum menggunakan Jawa Barat sebagai sampel.

“Laporan penelitian ini akan diserahkan kepada Dewan Pengupahan Nasional untuk dipertimbangkan dan sebagai referensi guna mereformasi kebijakan penetapan upah di Indonesia,” kata Lusiani Julia, Staf ILO. Ia menambahkan bahwa penelitian ini diharapkan dapat membantu negeri ini dalam menetapkan sistem penetapan upah minimum. ❁

Proyek Pemagangan - Inisiatif APINDO untuk Ketenagakerjaan Muda

Untuk mendukung inisiatif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalam mengatasi pengangguran muda, membekali angkatan kerja Indonesia dengan keterampilan praktis serta menyesuaikan keahlian mereka dengan kebutuhan para pengusaha di Indonesia, Biro Kegiatan Pengusaha (ACT/EMP) ILO dan Apindo sepakat untuk menjalin kerja sama melalui proyek pemagangan. Proyek ini didukung oleh ACT/EMP-Kemitraan Nowergia. Untuk mengawali proyek dan mengkaji seberapa besar minat dan komitmen perusahaan, sebuah pertemuan pembukaan diadakan pada 21 Oktober di Jakarta.

Dihadiri 50 peserta dari sekitar 25 perusahaan serta Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perekonomian, acara ini dibuka Agung Pambudhi, Direktur Eksekutif Apindo dan Michiko Miyamoto, Deputy Direktur ILO Jakarta.

Pertemuan ini bertujuan memperkenalkan proyek pemagangan Apindo dan memberi kesempatan bagi para peserta untuk memahami praktik skema pemagangan saat ini yang disediakan perusahaan-perusahaan besar maupun kecil di Indonesia. Pertemuan ini juga bertujuan mempelajari

tantangan yang mereka hadapi serta mengidentifikasi peran yang dapat dimainkan Apindo. Secara khusus, dua perusahaan – Astra International dan PT Sarandi Karya Nugraha – memaparkan skema pemagangan mereka.

Pertemuan ini juga memaparkan kerangka untuk memperkenalkan rencana Apindo mengadakan survei lapangan di wilayah Jakarta dan sekitarnya serta Kalimantan Timur untuk mengumpulkan informasi tentang praktik pemagangan di tingkat perusahaan serta informasi tentang kegiatan rekrutmen, pelatihan dan sertifikasi dan kemitraan dengan pemerintah daerah dan balai latihan serta memahami tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan Indonesia tentang pemagangan.

Survei ini juga akan mengidentifikasi kesenjangan serta menawarkan cara memperbaiki program pemagangan di tingkat perusahaan. Laporan survei ini akan dijadikan pondasi dalam mengembangkan studi kasus tentang praktik terbaik atau panduan tentang pemagangan bagi pengusaha di Indonesia. Semua kegiatan ini diperkirakan selesai pada tahun 2015. ❁

Menuju Ratifikasi Konvensi Maritim Ketenagakerjaan

Saat Konvensi Maritim Ketenagakerjaan, 2006 (MLC, 2006) diadopsi oleh Sidang ke-94 (tentang Maritim) Konferensi Perburuhan Internasional ILO pada Februari 2006, sidang ini dianggap sebagai "sidang yang bersejarah". MLC dianggap pelaut sebagai "piagam hak" yang akan membantu memastikan "pekerjaan layak" bagi para pelaut, tanpa memandang di mana lokasi kapal mereka berlayar dan bendera apa yang mereka kibarkan.

Fitur utama MLC adalah ia dibangun berdasarkan kekuatan pendekatan ILO untuk memastikan bahwa, di setiap negara, standar ketenagakerjaan internasional dilaksanakan secara efektif di "tingkat bawah". Di saat yang sama, MLC memenuhi tantangan industri global ini dengan mengambil alih elemen-elemen yang ditemukan dalam Konvensi-konvensi maritim penting lainnya guna memastikan perkapalan yang lebih aman dan terjamin serta mencegah polusi kelautan.

Untuk Indonesia, MLC memiliki pengaruh besar karena Indonesia merupakan negara yang memasok pelaut terbesar kedua di dunia. Karenanya penting bagi otoritas terkait untuk mengadopsi sistem pengawasan, pemantauan dan pengendalian rutin secara efektif dan terkoordinir terhadap perkapalan.

Untuk membangun kesadaran di kalangan pejabat pemerintah tentang pentingnya MLC dan pelaksanaannya,

mengingat Indonesia akan meratifikasi konvensi ini pada 2015, Kementerian Tenaga Kerja dan ILO mengadakan pelatihan tentang Konvensi Maritim Ketenagakerjaan di Bogor dari 27-30 Oktober. Dibuka oleh Mochtar Lutfie, Direktur Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan, pelatihan ini dihadiri 25 peserta dari berbagai direktorat (hubungan industrial, pengawasan, penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, termasuk BNP2TKI).

Moira McConnel, Spesialis Senior bidang Hukum ILO, menginformasikan para peserta bahwa hingga saat ini, terdapat lebih dari 65 negara yang telah meratifikasi MLC. "Ratifikasi ini membawa tantangan tapi juga pendekatan inovatif untuk memperbaiki kondisi yang ada."

Sementara itu, perwakilan Pemerintah Singapura dan Filipina, Lau Weng Hong dan Niconar Bon, mengakui pada awalnya mereka tidak memiliki sistem yang terpadu dan terkoordinir untuk melaksanakan MLC. "Indonesia tidak perlu berkecil hati dan dapat belajar tentang cara memastikan koordinasi yang efektif di kalangan otoritas dalam melaksanakan MLC." ❁

Memperkuat Program Infrastruktur

Padat Karya untuk Investasi Publik dan Lapangan Kerja

© ILO Jakarta



Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) telah mengadopsi pendekatan berbasis sumber daya lokal (LRB) ILO dalam program Infrastruktur Padat Karya guna mendukung peningkatan kualitas aset dan lapangan kerja yang dihasilkan program-program ini. Adopsi ini berdasarkan proyek-proyek yang dilaksanakan ILO dari tahun 2006 dan seterusnya yang memperlihatkan penerapan pendekatan LRB dalam kegiatan pemulihan bencana dan mitigasi perubahan iklim.

ILO kini tengah menyediakan bantuan teknis bagi Kemenaker melalui proyek percontohan pembangunan lima buah jembatan (empat jembatan gantung dan satu jembatan layang) dengan menggunakan pendekatan LRB di empat provinsi: Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Banten. Semua tahap konstruksi direncanakan selesai pada akhir tahun 2014.

Untuk memastikan keberlanjutan dan replikasi program-program pembangunan ini, Kemenaker telah meningkatkan alokasi anggarannya untuk perencanaan pengawasan dan pemeliharaan mulai tahun ini. Di samping itu, hasil dari proyek percontohan ini akan digunakan sebagai acuan bagi program-program pembangunan di masa mendatang di seluruh Indonesia menggunakan dana tetap dari anggaran negara (APBN).

"Pembangunan jembatan ini dilaksanakan melalui kontrak dengan masyarakat setempat. Semua pondasi jembatan hampir selesai. Pendekatan LRB yang digunakan dalam program-program pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan manfaat bagi masyarakat setempat, terutama untuk meningkatkan kepemilikan dan keberlanjutan program-program pembangunan di masa mendatang," kata Enardson Layang, Insinyur ILO untuk Infrastruktur Padat Karya.

Menyadari pentingnya perencanaan, pelaksanaan dan dampak terukur dari program-program pembangunan ini, ILO telah memperkenalkan sistem pemantauan dan evaluasi dengan mengadakan kajian sebelum dan sesudah pelaksanaan program. "Kajian ini perlu dilakukan oleh masyarakat setempat. Karenanya, sejalan dengan tahap konstruksi, ILO mengadakan pelatihan bagi masyarakat tentang cara melaksanakan survei awal sebelum memulai tahap pembangunan dan survei dampak diakhir tahap pembangunan," Enardson menambahkan.

Di samping itu, serangkaian pelatihan diadakan bagi para kontraktor swasta yang memproduksi elemen jembatan, pegawai pemerintah dan para pengawas. Bersama dengan Dinas Tenaga Kerja tingkat provinsi, kebutuhan pelatihan, termasuk pelatihan pemeliharaan, untuk petugas teknis disusun untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam paket pelatihan tetap dinas. Sementara di tingkat kabupaten, sejumlah pegawai dinas tenaga kerja berpartisipasi dalam pelatihan untuk pelatih mengenai pemeliharaan jembatan agar mereka dapat secara langsung melatih masyarakat setempat tentang pemeliharaan jembatan. ❁

.... hasil dari proyek percontohan ini akan digunakan sebagai acuan bagi program-program pembangunan di masa mendatang di seluruh Indonesia.....

Mempromosikan Pekerjaan Layak dalam Agenda Ketahanan Pangan di NTT

Pekerjaan layak merupakan jalan keluar penting dari kemiskinan dan kelaparan. Berdasarkan pengalaman dan keberhasilannya dalam melaksanakan proyek ketenagakerjaan dan menghasilkan pendapatan, ILO kini mengujicoba Proyek Pekerjaan Layak untuk Ketahanan Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai salah satu daerah tertinggal dan terisolir di Indonesia, selama satu tahun.

Tujuan utama proyek percontohan ini adalah mempromosikan kelangsungan mata pencarian para pekerja dan keluarga mereka melalui pekerjaan layak dalam rantai nilai hasil pertanian yang berpotensi menyediakan lapangan kerja, menghasilkan pendapatan serta produktivitas yang tinggi. Untuk mencapai sasaran ini, Proyek difokuskan pada tiga jenis rantai nilai yang diidentifikasi di NTT, terutama di empat kabupaten: Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS), Belu dan Sumba Timur.

Tahun ini, Proyek akan difokuskan di Kabupaten Kupang dengan tiga jenis komoditas, yaitu hewan ternak, jagung dan rumput laut. Salah satu daerah sasaran di kabupaten ini adalah Pulau Semau. Pulau ini ditetapkan sebagai prioritas utama bagi program ketahanan pangan di NTT karena karakteristiknya sebagai salah satu daerah tertinggal di negeri ini. Pulau yang terletak di tenggara Indonesia ini hanya dapat diakses melalui kapal selama setengah jam dari pelabuhan Kupang.

Tiga desa di Pulau Semau sudah disasarkan sebagai kluster dengan fokus utama meningkatkan potensi pekerjaan layak serta mengamankan ketersediaan dan akses pangan. Setelah penilaian awal dilakukan dari sisi penawaran dan permintaan, pembudidayaan rumput laut dipilih sebagai salah satu komoditas utama.

"Saat melakukan pendekatan dengan warga setempat, pada awalnya mereka sempat ragu-ragu. Berbeda dari kegiatan program yang lain, proyek percontohan ILO ini tidak menawarkan uang atau bantuan tunai. Namun, setelah turut serta dalam sesi-sesi pelatihan tentang pengembangan rantai nilai, mereka mulai memperlihatkan minat, terutama saat belajar tentang cara meningkatkan produktivitas dan memperoleh keuntungan lebih besar dari kerja keras mereka," kata Yunirwan Gah, Manajer Proyek Ketahanan Pangan ILO, menjelaskan mengenai respons masyarakat setempat terhadap kegiatan Proyek ini.

Sementara itu bagi Tince, Fince dan Dortia, yang lahir dan tinggal di Pulau Semau sepanjang hidup mereka, kegiatan

“*Proyek percontohan ini kini mengadakan penelitian partisipatif tentang rumput laut, jagung dan hewan ternak. Sejumlah kegiatan persiapan untuk masyarakat akan menyediakan intervensi yang tepat dan berkelanjutan agar produktivitas dan perencanaan usaha masyarakat setempat dapat ditingkatkan*”

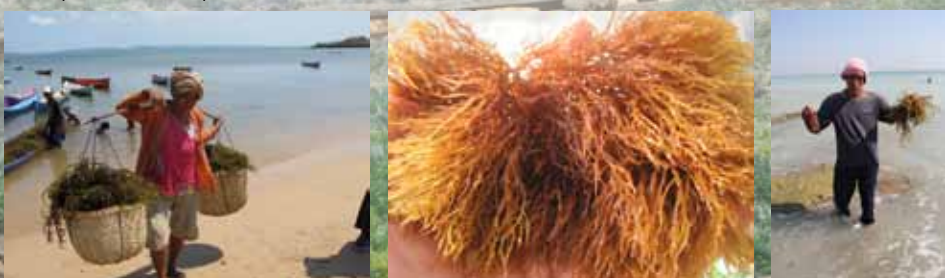
Yunirwan Gah
Manajer Proyek
Ketahanan Pangan ILO

rantai nilai ini memberi harapan baru. "Ya, kami semua bekerja di sektor rumput laut, bawang merah, beras dan jenis perkebunan lain. Kami juga beternak kambing dan sapi," kata ketiga perempuan setengah baya ini serentak seraya menjaga cucu-cucu mereka.

Seperti layaknya sebagian besar warga desa di pulau ini, keluarga mereka juga bekerja di bidang pembudidayaan rumput laut sebagai sumber penghasilan utama. Semua anggota keluarga, termasuk anak-anak, terlibat dalam usaha keluarga ini. "Kami sudah membudidayakan rumput laut sejak tahun 2000. Kadang-kadang hasil panen bagus dan menjanjikan, tapi di lain waktu wabah penyakit menghancurkan rumput laut kami sehingga kami tidak memperoleh hasil apa-apa," kata Tince.

Di samping itu, pemasaran dan harga jual menjadi masalah utama bagi warga setempat. Karenanya, mereka menyambut baik setiap bantuan terkait pengembangan usaha mereka. "Biasanya kami tidak melakukan tawar-menawar. Untuk apa? Kami tidak punya kapasitas dan kami sama sekali tidak tahu cara bernegosiasi dengan pengumpul atau pembeli. Kami hanya tergantung pada berapapun harga yang ditetapkan pengumpul untuk hasil panen kami," kata Fince.

Akibatnya, kata Dortia, sebagian besar warga desa terpaksa menjual apa saja yang mereka miliki di saat menghadapi keadaan darurat atau meminjam uang kepada siapa saja yang bisa. Jadi, mereka berharap dengan adanya pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik tentang cara mengembangkan dan mengelola sumber daya lokal, seperti rumput laut, warga desa dapat memperoleh penghasilan yang lebih besar dan meningkatkan taraf hidup mereka. 🌱



Harapan Baru bagi Kepulauan Mentawai

Hari masih pagi di Dusun Maurou, Desa Bulasat, Pagai Selatan, Kepulauan Mentawai. Namun deru alat pemotong kayu sudah terdengar dari bengkel pembuatan mebel Sinula Perabot. Ringgas Samaloisa, sang pemilik, tampak sibuk membuat lemari kayu; sementara tiga pekerjanya sibuk memenuhi pesanan pintu dan kusen jendela.

“Saya tidak pernah membayangkan kehidupan saya seperti ini. Bencana tsunami tahun 2010 telah mengubah hidup saya menjadi lebih baik. Bengkel pembuatan perabotan ini terus menerima pesanan sebanyak 500 pintu dan kusen jendela dari masyarakat setempat yang sedang memperbaiki dan membangun kembali rumah baru mereka,” jelas Ringgas. Dari usahanya ini, ia mampu memperoleh pemasukan sebesar Rp. 10 juta hingga Rp. 30 juta per bulan.

Sementara itu, Januar memilih untuk membuka bengkel servis motor. Kondisi jalan yang ekstrim membuat motor yang digunakan sebagai alat transportasi utama membutuhkan perawatan dan perbaikan secara rutin. Meski ia hanya menerima tiga hingga empat motor per bulan, ia yakin usahanya akan terus berkembang.

Seperti Januar, Firky Agusta Pratama memfokuskan usahanya di bidang servis motor. Namun, ia memilih untuk menyediakan layanan servis berjalan (*mobile*) sebagai keunggulan kompetitifnya. Ia langsung mendatangi rumah-rumah pelanggan dan dapat memperbaiki satu atau dua buah motor seminggu.

“Kurangnya suku cadang dan jauhnya jarak perjalanan ke setiap rumah (pelanggan), saya tidak dapat memperbaiki lebih dari dua motor per minggu. Sejauh ini, saya memperoleh penghasilan yang cukup, Rp. 2 juta per bulan.”

Relawati Tailleu lebih memilih usaha keripik talas. Setiap minggu, ia mengepak keripik ke dalam plastik-plastik kecil dan menjualnya seharga Rp. 7.000 sampai Rp. 8.000 per bungkus. Ia tidak lagi tergantung pada pemasukannya dari hasil kebun. “Mentawai terkenal akan sumber daya alamnya.

Di sini mudah mendapatkan pisang dan talas dan tidak dibutuhkan biaya besar untuk membuat keripik. Penghasilan yang saya dapatkan sangat membantu keluarga saya.”



© ILO Jakarta



▲ Para peserta pelatihan pembuatan makanan kecil, perbaikan motor dan pembuatan mebel

Ringgas, Januar, Firky dan Relawati adalah para penerima manfaat yang berasal dari Pagai Selatan dan Pagai Utara, Mentawai. Mereka terpilih Program Pemulihan Mata Pencarian Kepulauan Mentawai ILO untuk mengikuti program pelatihan keterampilan di bidang makanan ringan, servis motor dan pembuatan perabot selama dua minggu di Balai Latihan Kerja (BLKI) Sumatera Barat dan Balai latihan Universitas Padang.

Mereka tidak pernah bermimpi menjadi pengusaha. Laiknya sebagian besar penduduk Mentawai, sebelum tsunami menghantam kepulauan ini pada Oktober 2010, mereka bekerja di perkebunan—menanam coklat, kelapa dan minyak nilam—atau sebagai pekerja di industri perikanan. Bencana tsunami menimbulkan kerugian sebesar Rp. 117,82 milyar, dan hampir 80 persen dari total kerugian ini diderita sub-sektor perkebunan dan perikanan.

“Kami memilih jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal agar mereka dapat menerapkan apa yang mereka pelajari untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Pelatihan ini difokuskan tidak saja pada keterampilan hidup dan cara memperoleh penghasilan, tapi juga perubahan pola pikir dan perilaku. Mereka belajar

tentang perencanaan usaha, pengelolaan

pemasaran dan pengembangan jaringan usaha,” kata Drs. Dinul Harbi dari Dinas Tenaga Kerja Kepulauan Mentawai.

Untuk memastikan peserta pelatihan memiliki kapasitas membuka usaha sendiri, semua penerima manfaat memperoleh bantuan pasca-pelatihan dari ILO. Bantuan diberikan dalam bentuk peralatan kerja, di samping pengemasan, merek, dan bantuan pemasaran, serta pembinaan usaha.

“**66** Saya melihat peluang usaha yang menjanjikan untuk bengkel servis motor. Warga setempat perlu merawat dan memperbaiki motor mereka, terutama dengan kondisi jalan seperti ini, berlumpur dan sulit dilalui. Kadang-kadang kami harus menggotong motor kami”

Januar

Peserta pelatihan

“Pelatihan ini merupakan bagi dari metodologi pelatihan “4 in 1” ILO yang memadukan survei keterampilan, pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi dan dukungan setelah pelatihan,” kata Irham Saifuddin, Staf ILO. “Namun, selain dukungan dan pelatihan kerja, hal yang paling penting adalah motivasi dan dedikasi dari para peserta. Motivasi dan semangat mereka sangat luar biasa. Mereka pantang menyerah apapun yang terjadi.”

Kepulauan Mentawai merupakan rantai kepulauan yang terdiri dari lebih 70 pulau dan pulau-pulau kecil di pantai barat Pulau Sumatera, Indonesia. Didanai Program Pemulihan Mata Pencaharian Kepulauan Mentawai merupakan program bersama antara United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), United Nations Development Programme (UNDP) dan ILO.

ILO terfokus pada intervensi pemulihan mata pencaharian dalam bentuk pengembangan keterampilan manajemen dan usaha melalui berbagai program pelatihan, termasuk pelatihan mengenai pengembangan usaha mikro, pemasaran dan proses pasca produksi.

Proyek dua tahun ini berakhir pada September. Saat penutupan proyek yang diadakan di Padang, praktik terbaik dan pelajaran yang diperoleh dipaparkan. “Diharapkan model pemulihan mata pencaharian ILO ini dapat direplikasi dan ditingkatkan oleh pemerintah kabupaten Mentawai, pemerintah provinsi Sumatera Barat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” ujar Irham.

Sementara itu, kehidupan dan impian masa depan yang lebih baik terus berlanjut bagi masyarakat Mentawai. Ringgas dan Relawati berharap dapat memperluas pangsa pasar usaha mereka ke pulau-pulau lain; sementara Januar berencana menambahkan fasilitas cuci dan modifikasi motor sementara Firky ingin membangun bengkel yang lebih besar. ❁

Diluncurkan di Jakarta pada Agustus, laporan ini mengkaji dampak Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang akan berjalan pada 2015, terhadap pasar kerja menggunakan model simulasi ekonomi. Laporan ini menyoroti tantangan dan kesempatan yang akan terjadi sejalan dengan pelaksanaan MEA, termasuk mengelola migrasi kerja, mendorong produktivitas dan upah, meningkatkan kualitas pekerjaan dan mendukung perubahan structural yang diperlukan dan kerja sama regional. Laporan juga menawarkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan untuk menciptakan pekerjaan yang lebih baik dan memastikan manfaat MEA terdistribusikan secara merata. ❁

* hanya tersedia dalam Bahasa Inggris

Menyediakan akses keuangan yang lebih baik bagi pengusaha lokal Mentawai

Sebagian besar atau sekitar 85 persen penduduk Mentawai bekerja sebagai petani kecil. Penelitian Lanskap Keuangan yang diadakan ILO membuktikan bahwa sebagian besar dari mereka yang bekerja sebagai petani hidup di bawah garis kemiskinan, dengan kualitas kehidupan yang lebih buruk dibandingkan mereka yang bekerja sebagai pengusaha di sektor non-pertanian. Berkurangnya hasil pertanian dan nilai tambah, membuat mereka tidak lagi dapat meraih keuntungan, atau bahkan menabung, sehingga mereka rentan terhadap gejolak hidup.

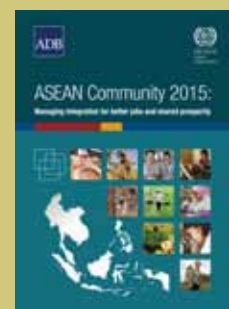
Penelitian yang mencakup lebih dari 220 rumah tangga dan lembaga keuangan mikro di Kepulauan Mentawai ini direncanakan dapat mencakup keluarga Mentawai yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah dan risiko usahanya, perilaku keuangan mereka, serta kapasitas lembaga keuangan yang ada dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan bantuan keuangan.

Menyikapi hal ini, melalui pelatihan Making Microfinance Works (MMW) dan diskusi kelompok terfokus, ILO berupaya mengkapitalisasi lembaga-lembaga keuangan mikro yang ada, tidak saja untuk meningkatkan partisipasi keuangan di kawasan ini, tapi juga memberdayakan serta membantu menjalin hubungan antara pasar dengan produsen. Hasil penelitian ini kini tengah disesuaikan dengan usulan rencana aksi di masa mendatang untuk pembangunan desa berbasis pasar di Mentawai, terutama untuk mengembangkan lembaga-lembaga keuangan di kawasan ini.

“Sesi pelatihan ini terbukti bermanfaat tidak saja untuk meningkatkan kemampuan manajemen mereka, tapi juga membangun jaringan penting dengan lembaga keuangan mikro dari Kepulauan Mentawai dan pulau Sumatera, sehingga mereka dapat terus menjalin hubungan dan kerja sama di masa mendatang,” kata Nurvitria M. Křištofiková, Manajer Proyek ILO untuk Daya Saing Usaha Kecil ASEAN. ❁

BUKU

ASEAN Community 2015: Managing integration for better jobs and shared prosperity*





© ILO Jakarta

Kampanye UN4U: ILO Mengunjungi Kampus

Sebagai bagian dari Kampanye UN4U di bawah Pusat Informasi PBB (UNIC), ILO mengunjungi kampus untuk meningkatkan kesadaran mengenai kegiatan PBB di Indonesia pada umumnya dan secara khusus kegiatan ILO. ILO berpartisipasi dalam UN Fairs yang diselenggarakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Indonesia dan Universitas Budi Luhur.

Selain itu, ILO berpartisipasi sebagai pembicara tamu di sejumlah universitas dan pusat pelatihan seperti Universitas Indonesia (Yohanis Pakereang, Staf Disabilitas ILO), Universitas Tarumanegara (Gillian Dowie, Staf Ketenagakerjaan Muda ILO), Universitas Bunda Mulia (Fasrul dan Dewayani Savitri, Staf Pekerja Anak ILO) dan Pusat Pelatihan Kementerian Dalam Negeri (Nurvitria M. Křištofiková, Staf Pengembangan Usaha ILO). Beragam isu yang dipaparkan dan dibahas adalah disabilitas, ketenagakerjaan muda dan pekerja anak.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ILO di Indonesia, kunjungi: www.ilo.org/jakarta. 🌐

© ILO Jakarta



pojok karyawan

DARMA WISATA ILO:

Serikat pekerja ILO Jakarta menggelar darma wisata ke Bangkok, Thailand, pada 6-9 Juni. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan serikat pekerja sebagai salah satu langkah mempererat hubungan staf ILO dan menikmati kebersamaan di luar kantor. 🌐

PENGEMBANGAN TIM ILO:

ILO menggelar kegiatan pengembangan tim di Pulau Sepa, Kepulauan Seribu, Jakarta dari 13-15 Agustus. Pengembangan tim ini bertujuan memperkuat jalinan komunikasi dan koordinasi internal di antara staf. Pengembangan tim juga mencakup sesi-sesi mengenai bagaimana memperkuat visi dan misi ILO dan meningkatkan kualitas kegiatan ILO. 🌐

